

**BALIHO SEBAGAI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DI KECAMATAN PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN
SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF TAHUN 2024**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Upaya Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Oleh:

NAFA PRATIWI PURBA
NIM : B1B221026

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

BALIHO SEBAGAI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nafa Pratiwi Purba

Nim : B1B221026

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk diajukan
dalam sidang skripsi pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 12 Juni 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Mariatul Qibtiyah, S.Sos., MA.Si.
NIP. 199004112023212036

Galank Pratama, S.I.P., M.Si.
NIP. 199704132024061001

LEMBAR PENGESAHAN

BALIHO SEBAGAI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024

Nama : Nafa Pratiwi Purba

Nim : B1B221026

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Hukum

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas
Hukum Universitas Jambi

Jambi, 02 Juli 2025

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dimasrizal, S.Sos., M.Si.	Penguji Ketua	
2.	Mariatul Qibtiyah, S.Sos., MA.Si.	Pembimbing Ketua	
3.	Galank Pratama, S.I.P., M.Si.	Pembimbing Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

MOTTO

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk-karakter kuat yang akan melawan kesulitan”

(Helen Keller)

”Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4:6)

“Atas segala ketidakmungkinan, aku percaya bahwa doa itu bisa merubah apapun.”

(1 Tesalonika 5:17)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nafa Pratiwi Purba
Nim : B1B221026
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Baliho Sebagai Alat Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024
No. HP : 081375208990

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 02 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan

Nafa Pratiwi Purba

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi kedekatan emosional dan hubungan sosial antar warga, baliho berfungsi tidak sekadar sebagai media promosi politik visual, melainkan sebagai representasi simbolik dari kehadiran calon legislatif di tengah-tengah masyarakat. Meskipun baliho sering dianggap sebagai alat komunikasi satu arah yang bersifat konvensional, penelitian ini menemukan bahwa baliho tetap memainkan peran penting dalam dinamika kampanye politik lokal, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap media digital dan informasi daring. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi, terungkap bahwa baliho turut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu, baik dalam bentuk kehadiran di kegiatan kampanye, diskusi politik, maupun keputusan untuk menggunakan hak pilih secara aktif. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dari Dan Nimmo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baliho sebagai alat peraga ini masih mampu dalam memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat di Kecamatan Purba dalam proses pemilu, baik dalam bentuk kehadiran di kegiatan kampanye, diskusi politik informal, maupun keputusan untuk menggunakan hak pilih secara aktif dan juga desa-desa yang masih minim akses jaringan internet. Dan berdasarkan indikator komunikator dalam skripsi ini yaitu M. Chrismes Haloho dan Radisna Silalahi, serta pesan politik yang menampilkan visi, misi dan simbol partai, media komunikasi politik dalam penelitian ini yaitu baliho sebagai sarana visual setiap kandidat, sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat pemilih di Kecamatan Purba, sehingga memunculkan efek komunikasi politik yaitu peningkatan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Purba.

Kata Kunci: Baliho, Alat Peraga Kampanye, Komunikasi Politik, Pemilu

ABSTRACT

This research examines the use of billboards as campaign props in increasing community political participation in Purba District, Simalungun Regency, North Sumatra, in the 2024 Legislative Election. In the context of a society that still values emotional closeness and social relations between citizens, billboards function not just as a visual political promotion medium, but as a symbolic representation of the presence of legislative candidates in the midst of society. Even though billboards are often considered a conventional one-way communication tool, this research finds that billboards still play an important role in the dynamics of local political campaigns, especially in areas that still have limited access to digital media and online information. Through a qualitative descriptive approach, and data collection techniques in the form of interviews, field observations, and documentation, it was revealed that billboards also influence the level of community involvement in the election process, both in the form of attendance at campaign activities, political discussions, and the decision to actively exercise the right to vote. The theory used is Dan Nimmo's political communication theory. The research results show that billboards as a visual aid are still capable of influencing the level of community involvement in Purba District in the election process, both in the form of attendance at campaign activities, informal political discussions, and the decision to actively use the right to vote and also in villages that still lack internet network access. And based on the communicator indicators in this thesis, namely M. Chrismes Haloho and Radisna Silalahi, as well as political messages that display the party's vision, mission and symbols, the political communication media in this research are billboards as a visual means for each candidate, the target in this research is the voting public in Purba District, giving rise to political communication effects, namely increasing political participation in the Purba District community.

Keywords: *Billboards, Campaign Props, Political Communication, Elections*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta kepada:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta, terkhusus cinta pertamaku, ayahanda Rajoki Purba selalu bekerja keras dan selalu mendukung setiap langkah penulis, mendidik serta selalu mendoakan dan Ibuku tersayang Dewi Sartika Saragih yang menjadi rumah dan penghangat anak-anaknya.
- ❖ Kakakku serta Adik-adikku Tercinta, yang selalu memberikan bantuan disetiap proses penulis.
- ❖ Diri sendiri, yang mampu berjuang, berusaha serta bertahan sejauh ini.
- ❖ Sahabatku Tercinta
- ❖ Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun judul Skripsi ini adalah “BALIHO SEBAGAI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024”.

Dalam menyusun penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan tertinggi kepada semua pihak. Yang terlibat, terutama kepada Ibu Mariatul Qibtiyah, S.Sos., MA.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Galank Pratama, SIP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan dan kesabaran yang beliau berikan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga akhir skripsi ini. Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik terlepas dari bimbingan yang beliau berikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bagian Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H, Wakil Dekan Bagian Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., MIPol., Ph.D. dan Ibu Sutri Destemi Elsi, S.IP., MIP Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP, M.LP. Ketua Program Studi Ilmu Politik yang telah menyetujui permohonan penyusunan Skripsi.
8. Bapak Dimas Rizal S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan-masukan di setiap semesternya.

9. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Cinta pertamaku dan panutanku Bapak Rajoki Purba dan pintu surgaku Ibu Dewi Sartika Saragih. Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi, dukungan, material, waktu, doa dan tulus kasih yang tiada henti diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai di titik ini, terimakasih cintaku. Terimakasih telah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih atas semua support Bapak dan Mamak penulis bisa berada di titik ini, sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi Bapak dan Mamak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian penulis.
11. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung penulis, Nani Kartika Purba, S.P., Diki Prasetyo Purba dan Diego Costa Purba, Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh Pendidikan selama ini, Terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat tersayang, Eugenia Gracia Br. Sibuea, Desrina Waruwu, Dewi Putri Sitompul dan Dewi Nanda Saputri. Terima kasih telah mendukung, memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman teman Ilmu Politik Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir untuk memperoleh gelar S.sos. Semoga Tuhan Yesus membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah mendampingi dan membantu penulis hingga saat ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap

kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu terutama di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

14. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bekerja keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga atas bantuan semua pihak yang terkait mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Hormat Penulis

Jambi, 02 Juli 2025

Nafa Pratiwi Purba
B1B221026

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Landasan Teori.....	17
1.6 Kerangka Berpikir	21
1.7 Metode Penelitian.....	22
1.7.1 Jenis Penelitian.....	22
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	23
1.7.3 Fokus Penelitian.....	23
1.7.4 Sumber Data.....	24
1.7.5 Teknik Penentuan Informan	25
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	26
1.7.7 Teknik Analisis Data	27

1.7.8 Keabsahan Data.....	29
---------------------------	----

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun	31
2.1.1 Sejarah Kabupaten Simalungun.....	34
2.1.2 Letak Wilayah Dan Topografi.....	35
2.2 Gambaran Umum Kecamatan Purba	36
2.2.1 Letak Wilayah Geografis Kecamatan Purba	36
2.2.2 Profil Kependudukan Kecamatan Purba	39
2.2.3 Kondisi Sarana Dan Prasarana Kecamatan Purba	42
2.3 Gambaran Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Purba	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Legislatif di Kecamatan Purba Tahun 2024.....	50
3.1.1 Komunikator Politik.....	54
3.1.2 Pesan Politik.....	62
3.1.3 Saluran atau media politik.....	67
3.1.4 Sasaran atau target politik	70
3.1.5 Pengaruh atau efek komunikasi politik	73

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian	21
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun	35
Gambar 3.1 Baliho calon anggota legislatif.....	53
Gambar 3.2 Alat peraga Kampanye calon legislatif.....	55
Gambar 3.3 Baliho di tempat yang sering dilewati masyarakat.....	59
Gambar 3.4 Pesan baliho.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Calon DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2024	4
Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Purba Tahun 2019 dan 2024 ...	8
Tabel 1.3 Data Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purba Pada Tahun 2019 dan 2024.....	9
Tabel 1.7.5 Data Informan Wawancara	25
Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Simalungun	32
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Purba	38
Tabel 2.3 Jumlah DPT Kecamatan Purba	44
Tabel 2.3.1 Perbandingan Fasilitas Antar Desa.....	45
Tabel 3.1 Data Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purba Pada Tahun 2019 dan 2024.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Robert A. Dahl, mengemukakan bahwa pemilu merupakan komponen utama dalam *polyarchy* (pemerintahan oleh banyak orang) sebuah bentuk demokrasi modern yang dicirikan oleh kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, serta keberadaan kompetisi yang terbuka dan adil dalam perebutan kekuasaan politik.¹ Dalam kerangka ini, pemilu tidak sekadar mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi arena interaksi antara masyarakat dan negara dalam membentuk kebijakan publik. Pemilu yang sehat dan demokratis menuntut adanya akses informasi politik yang memadai, kebebasan memilih tanpa tekanan, serta keberadaan lembaga penyelenggara yang independen.

Pemilihan umum artinya masyarakat beraktivitas melakukan pemilihan seseorang atau kelompok untuk menduduki posisi memimpin rakyat, pimpinan negara atau pemerintahan. Dapat diartikan pemerintah dipilih oleh rakyat. Semua penduduk wilayah berhak yang sama dalam memilih calon kandidat yang akan menjadi pemimpin mereka, dengan pemilihan umum terdapat prosedur politik dalam menerangkan pendapat serta tujuan masyarakat pada tahap pemilihan beberapa elemen masyarakat untuk dijadikan pimpinan pemerintah. Pemilu di Indonesia terus menjadi isu

¹ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 220–222.

.kontroversial sejak era pasca-kejatuhan Orde Baru. Bahkan, keberadaan lembaga pengawas pemilu tidak mampu sepenuhnya meredam perdebatan yang muncul terkait pelaksanaannya, tetapi cara-cara kampanye yang berbagai macam cara yang muncul untuk memperkenalkan calon kandidat yang akan melaju pada kontes demokrasi.

Pada 2024 Indonesia mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat beberapa konsekuensi fundamental yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan hasil pemilihan legislatif.² Indonesia menggunakan system proporsional terbuka, dimana masyarakat yang memilih tidak sekedar melakukan pilihan terhadap kelompok politik tetapi calon anggota legislatif yang juga dengan langsung mendatangi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) terdekat. Dimana tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilihan umum secara langsung guna menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden beserta calon anggota legislatif.

Pemilihan legislatif merupakan proses pemilihan yang dilakukan guna menentukan personel legislatif di tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. pemilihan legislatif merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

² *Undang -Undang Tentang Pemilihan Umum*, Unadang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Perundangan tersebut menjadi suatu landasan fundamental untuk mengatur berbagai macam aspek tentang pilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden mengenai ketentuan dasar kampanye. Hal ini memungkinkan calon anggota legislatif yang berasal dari kelompok politik yang sama akan saling berkompetisi, dan calon dengan memiliki suara terbanyak akan menang. Sehingga calon legislatif perlu berupaya keras dalam kampanye individual.

Para calon anggota DPRD saling memperebutkan kursi panas terutama pada pemilihan legislatif, di Dapil Simalungun 1 para calon kandidat saling mengusung visi dan misi yang beragam. Keragaman yang terjadi mencerminkan dinamika politik lokal dan dapat memberikan pilihan atau informasi yang luas bagi masyarakat pemilih.

Pelaku politik senantiasa memperhatikan tingkatan kontribusi politik oleh rakyat untuk memilih lembaga legislatif, yang berperan penting dalam menentukan hasil pemilihan. Mengingat signifikansi partisipasi ini bagi kepentingan politik, setiap kandidat berupaya memengaruhi keterlibatan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan kampanye politik. Melalui penerapan strategi yang dirancang dalam kampanye, para kandidat dapat menyampaikan pesan serta visi masa depan guna

³ *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

membentuk opini, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung calon anggota DPRD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan umum, yang mencakup atas pemilihan legislatif dan pilihan presiden. Peraturan ini juga mencakup penyusunan pedoman teknis kampanye bagi calon anggota legislatif (caleg). Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menggunakan pedoman teknis tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kampanye pemilihan anggota legislatif.⁴ Setiap pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam pemilu diwajibkan untuk memiliki Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya dilakukan oleh KPU. Peraturan ini membatasi jumlah APK yang dapat digunakan serta bertujuan untuk mencegah terjadinya kampanye yang bersifat berlebihan.

Penggunaan pesan yang disampaikan melalui strategi kampanye dapat berupa alat peraga. Baliho sebagai contoh dari APK akan disebar di tempat-tempat yang strategis dan ramai oleh calon-calon kandidat dan tim suksesnya di daerah masing-masing. Termasuk yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dapil Simalungun 1.

Tabel 1.1
Daftar Calon DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2024

No	Nama Partai	Daftar Calon DPRD Kab. Simalungun
1	PKB	7
2	GERINDRA	9

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kampanye

3	PDIP	9
4	GOLKAR	9
5	NASDEM	9
6	PARTAI BURUH	1
7	PKS	7
8	HANURA	9
9	PBB	2
10	DEMOKRAT	9
11	PSI	6
12	PERINDO	9
	Total	86

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2024

Alat peraga kampanye melalui baliho adalah Solusi yang dipergunakan untuk mengkampanyekan adanya pemilu. Dimana para caleg menggunakan alat peraga kampanye ini sebagai media dalam iklan politik.⁵ Meskipun metode kampanye ini merupakan metode tradisional tetapi para calon anggota legislatif eksekutif dalam menggunakan media cetak baliho sebagai salah satu alat peraga kampanye yang bertujuan untuk menyampaikan visi misi para calon. Faktor keunggulan baliho sebagai alat kampanye adalah dapat diletakkan berbagai titik Lokasi yang mana ramai warga melewatinya dan berbentuk gambar yang besar sehingga dapat menarik perhatian masyarakat.

Alat peraga kampanye (APK) sebagai suatu sarana yang terus ditemui pada acara pemilu Indonesia, bisa berupa bendera, spanduk, brosur dan bendera. Isi dari

⁵ Hakim, Lukmanul. (2021). "Pengaruh Penempatan Baliho Kampanye Terhadap Citra Calon Pemimpin pada Pemilihan Umum di Indonesia." Jurnal Politik Profetik, Vol. 5(2), hlm. 123-136.

materi kampanye mencakup visi, misi, serta program kerja kandidat atau pasangan kandidat, disertai dengan elemen visual seperti gambar dan slogan. Tujuan utama dari pesan atau elemen visual ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar memberikan dukungan suara kepada kandidat atau pasangan kandidat tersebut.

Keberadaan baliho sebagai APK berperan besar dalam memikat ateni public karena sifatnya yang visual dan mudah diakses. Dengan menampilkan gambar, slogan, dan pesan-pesan politik, baliho diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilih mengenai calon-calon yang bersaing dalam pemilihan legislatif.⁶ Terlebih lagi, di era digitalisasi dan media sosial, baliho tetap menjadi menjadi alat peraga kampanye yang sering digunakan, terutama di daerah Kabupaten Simalunguan, Kecamatan Purba, Sumatera Utara yang akses ke internetnya terbatas atau belum merata.

Masyarakat Kecamatan Purba itu masih mendapatkan informasi dari media cetak, media digital serta APK seperti surat kabar, radio, televisi, baliho, poster, dan spanduk, bukan melalui para calon-calon anggota legislatifnya langsung. Mengetahui baliho masih sangat mempengaruhi dalam mengumpulkan suara dari masyarakat pedesaan sehingga para calon berlomba-lomba menggunakan metode kampanye tersebut.

⁶ Aditya, R., & Pramudya, A. (2020). Kebijakan Pemasangan Baliho Kampanye dan Dampaknya terhadap Tata Ruang Kota: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah*, 5(1), 45-56.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah instansi yang berwenang memantau pelaksanaan pemilihan yang ada di Indonesia. Bawaslu berperan penting untuk memberikan pengawasan dan menertipkan pemasangan baliho atau alat peraga kampanye (APK). Terkait dengan pemasangan baliho bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemasangan APK berdasar pada tata tertib yang ditentukan KPU. Seperti lokasi pemasangan, ukuran dan jumlah, izin pemasangan dan lain sebagainya.

Adapun penertipan yang dilakukan oleh bawaslu merupakan upaya pengawasan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertipan dilakukan Ketika ditemukan pelanggaran dalam pemasangan atau konten terkait APK selama masa kampanye. Dimana yang terjadi pada saat pemasangan baliho sering sekali di pasang sebelum tanggal yang sudah ditetapkan oleh bawaslu, sehingga masyarakat dapat mengetahui calon-calon presiden dan anggota legislatif lebih cepat.⁷

Yang menjadi masalah pada kampanye politik dan tim suksesnya adalah dimana terdapat 14 desa dan hanya 4 desa yang memiliki akses jaringan yang memadai, 10 desa lainnya masih jauh dari perkotaan sehingga akses jaringan masih sangat susah, ada beberapa tempat yang sama sekali tidak memiliki akses jaringan.⁸ Maka masyarakat jarang sekali menggunakan handphone untuk melihat iklan politik bakal calon yang sedang bersaing untuk memperebutkan kursi panas DPRD dapil Simalungun

⁷ Tempo. (2019). Peraturan Kampanye Pemilu: Cara Pemasangan Baliho dan Spanduk yang Sesuai Aturan . Diakses dari <https://tempo.co>

⁸ Diakses dari internet Kodepos diakses pada 23 September 2024, <https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/purba-342723>

1. Masih terdapatnya banyak masyarakat yang apatis dan tidak tertarik terhadap politik dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan.

Kecamatan Purba terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan kondisi geografis yang bervariasi. Kecamatan ini meliputi atas 13 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di daerah pegunungan dan perbukitan. Sehingga akses jaringan yang tidak merata, beberapa desa mengalami kesulitan dalam hal akses jaringan telekomunikasi dan internet. Meskipun beberapa desa di kecamatan ini sudah terjangkau oleh sinyal operator seluler, tetapi tidak semua wilayah memiliki kualitas sinyal yang memadai. Di desa-desa yang lebih terpencil atau berbukit, sinyal telekomunikasi cenderung lemah, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi yang tersedia secara online, termasuk media sosial atau portal berita yang dapat memberikan informasi politik.

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Purba Tahun 2019 Dan 2024

No	Nama Desa	Daftar Pemilih Tetap 2019	Daftar Pemilih Tetap 2024
1	Purba Tengah	1.072	1.273
2	Pematang Purba	1.605	2.083
3	Urung Purba	1.375	1.575
4	Purba Sipinggan	1.463	1.741
5	Hinalang	1.602	2.001
6	Purba Dolok	968	1.100
7	Tano Tinggir	807	959
8	Tiga Runggu	2.457	3.547
9	Saribu Jandi	970	1.257
10	Huta Raja	799	884

11	Bandar Sauhur	562	667
12	Bunga Sampang	396	492
13	Nagori Tongah	811	1.110
14	Urung Pane	1.263	1.532
	Total	16.150	20.221

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2024

Berdasar pada tabel yang disajikan, menyatakan bahwasanya pemilih tetap paling banyak ada di desa Tiga Runggu, pada tahun 2019 sebanyak 2.457 dan pada tahun 2024 sebanyak 3.547. Desa Purba Tongah, pada tahun 2019 sebanyak 1.072 dan pada tahun 2024 sebanyak 1.273 pemilih, Desa Pematang Purba, pada tahun 2019 sebanyak 1.605 dan pada tahun 2024 sebanyak 2.083 pemilih, Desa Urung Purba, tahun 2019 sebanyak 1.375 dan tahun 2024 sebanyak 1.575 pemilih, Desa Purba Sipinggian, tahun 2019 sebanyak 1.463 dan tahun 2024 sebanyak 1.741 pemilih, Desa Hinalang tahun 2019 sebanyak 1.602 dan tahun 2024 sebanyak 2.001 pemilih, Desa Purba Dolok, tahun 2019 sebanyak 968 dan tahun 2024 sebanyak 1.100 pemilih, Desa Tano Tinggi, pada tahun 2019 sebanyak 807 dan tahun 2024 sebanyak 959 pemilih, Desa Saribu Jandi, tahun 2019 sebanyak 970 dan tahun 2024 1.257 pemilih, Desa Huta Raja, tahun 2019 sebanyak 799 dan tahun 2024 sebanyak 884 pemilih, Desa Bandar Sauhur, tahun 2019 sebanyak 562 dan tahun 2024 sebanyak 667 pemilih, Desa Bunga Sampang, tahun 2019 sebanyak 396 dan tahun 2024 sebanyak 492 pemilih, Desa Nagori Tongah, tahun 2019 sebanyak 811 dan tahun 2024 sebanyak 1.110 pemilih, Desa Urung Pane, pada tahun 2019 sebanyak 1.263 dan tahun 2024 sebanyak 1.532

pemilih. Jumlah pemilih di Kecamatan Purba pada tahun 2019 sebanyak 16.150 dan tahun 2024 sebanyak 20.221 pemilih.⁹

Tabel 1.3
Data Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purba Pada Tahun 2019 dan 2024

No	Nama Desa	Data Partisipasi 2019	Data Partisipasi 2024
1	Purba Tengah	713	855
2	Pematang Purba	1.137	1.620
3	Urung Purba	991	1.147
4	Purba Sipingga	1.102	1.254
5	Hinalang	1.167	1.586
6	Purba Dolok	606	702
7	Tano Tinggir	427	603
8	Tiga Runggu	1.884	3.020
9	Saribu Jandi	636	817
10	Huta Raja	503	538
11	Bandar Sauhur	376	474
12	Bunga Sampang	264	364
13	Nagori Tengah	574	634
14	Urung Pane	899	1.025
	Total	11.279	14.639

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2019 dan 2024

Berdasar pada tabel yang disajikan, menyatakan bahwasanya pemilih tetap paling banyak ada di Tiga Runggu, pada tahun 2019 sebesar 1.884 dan pada tahun 2024 sebesar 3.020. Desa Purba Tengah pada tahun 2019 sebanyak 713 dan pada 2024 sebanyak 855 pemilih, Desa Pematang Purba pada tahun 2019 sebanyak 1.137 dan pada tahun 2024 sebanyak 1.620 pemilih, Desa Urung Purba 2019 sebanyak 991 dan 2024 sebanyak 1.147 pemilih, Desa Purba Sipingga 2019 sebanyak 1.102 dan 2024

⁹ KPU Kabupaten Simalungun 2024

sebanyak 1.254 pemilih, Desa Hinalang 2019 sebanyak 1.167 dan 2024 sebanyak 1.586 pemilih, Desa Purba Dolok 2019 sebanyak 606 dan 2024 sebanyak 702 pemilih, Desa Tano Tinggi 2019 sebanyak 427 dan 2024 sebanyak 603 pemilih, Desa Saribu Jandi 2019 sebanyak 636 dan 2024 sebanyak 817 pemilih, Desa Huta Raja pada tahun 2019 sebanyak 503 dan 2024 sebanyak 538 pemilih, Desa Bandar Sauhur 2019 sebanyak 376 dan 2024 sebanyak 474 pemilih, Desa Bunga Sampang pada 2019 sebanyak 264 dan 2024 sebanyak 364 pemilih, Desa Nagori Tongah tahun 2019 sebanyak 574 dan 2024 sebanyak 634 pemilih, Desa Urung Pane 2019 sebanyak 899 dan 2024 sebanyak 1.025 pemilih. Jumlah keseluruhan partisipasi pemilih pada tahun 2019 dan 2024 di Kecamatan Purba adalah 25.918 pemilih. Partisipasi pemilih di Kecamatan Purba mengalami peningkatan yang cukup banyak pada tahun 2024.¹⁰

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena keberadaan alat peraga kampanye ini dapat mempengaruhi masyarakat yang melihat papan baliho tersebut. Dimana saat informasi disajikan maka individu masyarakat dapat memiliki pandangan dari sejumlah pendapat yang disajikan. Fenomena ini disebut sebagai opini publik, namun karakteristiknya cenderung berlaku pada masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi menengah hingga tinggi. Sebaliknya, opini yang terbentuk dapat berbeda pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah.

Sebagian besar warga dengan memiliki hak suara memperoleh data terkait anggota DPRD dari interaksi langsung kepada para tim sukses dari pasangan calon,

¹⁰ KPU Kabupaten Simalungun 2024

dan juga melalui alat peraga kampanye baliho. Mengetahui bahwa alat peraga kampanye (APK) sangat efektif maka para politisi dan tim suksesnya menggunakan alat peraga baliho guna mengsucceskan dalam mengkampanyekan pemilihan umum serta menghimpun sumber suara sebanyak mungkin.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Gunawansyah (2015) membahas mengenai efektivitas iklan politik di media cetak harian *Lampung* dalam konteks pemilihan gubernur Lampung, khususnya pada pemilih pemula. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwasanya "iklan politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas media cetak, terutama dalam aspek desain iklan, rekam jejak, visi-misi, profil, serta program kandidat." Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih pemula tidak dipengaruhi oleh pesan yang terkandung dalam iklan tersebut. Sebaliknya, mereka lebih terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti frekuensi kemunculan iklan, lokasi penempatan iklan, serta ukuran iklan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aris Gunawansyah (2015), media kampanye seperti bendera, umbul-umbul, spanduk, banner, stiker, poster, buklet, brosur, dan sejenisnya terbukti lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada pemilih selama proses pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 memberikan landasan yang mendukung penggunaan alat peraga kampanye

sebagai sarana yang dinilai efektif untuk menyampaikan pesan dari calon kepala daerah kepada masyarakat.¹¹

Studi sebelumnya yang dilaksanakan Regina Yulandari dan Zainal Abidin yang berjudul “Pengaruh Iklan Politik Baliho Sebagai Bagian Dari Strategi Kampanye T. Irwan Djohan Pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014”. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan baliho untuk sarana mengiklankan politik terbukti sangat efektif dalam membangun simpati masyarakat. Efektivitas ini tercapai melalui penyampaian pesan-pesan yang konstruktif, termasuk visi dan misi kandidat. Selain itu, baliho juga mampu merepresentasikan citra diri politisi, baik melalui foto, latar belakang pendidikan, maupun afiliasi partai pendukung. Sebagai salah satu strategi iklan politik, baliho dapat menjadi alat yang andal untuk mendukung keberhasilan kampanye. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada strategi penempatan dan penyajian iklan yang dilakukan oleh kandidat.¹²

Hilmi pada tahun 2014. Judul Penelitian “Analisis Semiotika pada Poster Kampanye Partai Politik Islam (Studi Kasus Calon Legislatif 2014 Dari PPP, PKB, PAN, dan PKS di Kota Semarang)” penelitian ini menemukan : bahwa poster

¹¹ Gunawahsyah, Aris. Skripsi. 2015. Efektifitas Iklan Politik Media Cetak Harian Lampung Tentang Pemilihan Gubernur Lampung Terhadap Khalayak Pemilih Pemula. Lampung: Universitas Lampung.

¹²Regina Yulandari dan Zainal Abidin, Pengaruh Iklan Politik Baliho sebagai Bagian dari Strategi Kampanye T. Irwan Djohan pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014),

kampanye menggunakan simbol-simbol budaya, agama, dan nasionalisme untuk menarik simpati masyarakat. Simbol agama seperti warna hijau dan elemen visual Islami sering digunakan untuk menegaskan identitas partai politik Islam. Selain itu, teks pesan cenderung menonjolkan kesan kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan janji-janji politik yang religius. Selain itu, penggunaan warna dalam konteks ini didominasi oleh warna hijau, terutama terkait dengan PPP dan PKB. Namun, PPP menunjukkan keberanian lebih besar dibandingkan PKB dengan mengintegrasikan elemen warna merah ke dalam dominasi hijau yang mereka gunakan. Poster Denawati Utami Wardhani mencerminkan pertimbangan geopolitik kota Semarang yang memiliki basis kuat pada PDIP, sementara PAN memanfaatkan kombinasi warna kuning dan biru, serta perpaduan merah muda dan hijau. Adapun PKS cenderung menggunakan kombinasi warna putih dan kuning. Perpaduan warna yang dipilih dirancang agar mudah diterima secara visual, meskipun tetap mengandung potensi risiko tertentu.¹³

Perbedaan dan kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi pada tahun 2014 memiliki perbedaan signifikan, yakni hanya menyoroti aspek bahasa visual (gambar) yang terdapat dalam poster kampanye sedang pada studi ini berfokus untuk mengkaji Bahasa visual (gambar) dan nonvisual (tagline). Pada penelitian Aris

¹³ Hilmi, Analisis Siematika pada Poster Kampanye Partai Politik Islam: Studi Kasus Calon Legislatif 2014 dari PPP, PKB, PAN, PKS di Kota Semarang.

Gunawansyah (2015) membahas Iklan politik tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas media cetak, khususnya jika ditinjau dari aspek desain iklan, rekam jejak, visi-misi, profil, serta program kandidat. Dan Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Regina Yulandari dan Zainal Abidin membahas tentang baliho memiliki peran yang signifikan dalam kampanye politik karena kemampuannya untuk menarik perhatian publik melalui penyampaian pesan-pesan yang konstruktif, serta pengenalan terhadap visi dan misi calon. Selain itu, baliho juga menjadi sarana strategis bagi politisi untuk membangun citra diri mereka dengan menampilkan foto, latar belakang pendidikan, dan identitas partai politik yang mendukung mereka, sehingga memperkuat legitimasi dan kedekatan dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa jurnal membahas tentang alat peraga kampanye dan iklan politik media cetak. Dimana penelitian ini menguatkan tentang baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kecamatan purba kabupaten simalungun Sumatera utara pada pemilihan legislatif 2024.

Bertolak dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai baliho sebagai media kampanye dan analisa terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sehingga penulis mengambil judul **“Baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik**

masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang diuraikan, peneliti mendapati perumusan permasalahannya yakni:

1. Bagaimanakah penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dengan berdasar pada perumusan permasalahan yang ditentukan diatas, yakni :

1. Guna memahami dan menganalisis sejauh mana baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Kebermanfaatan yang diharapkan penelitian dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini akan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya tentang baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba pada pemilihan legislatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, serta untuk memberi penulisan lebih banyak wawasan atau pengetahuan untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan suatu titik program studi Ilmu Politik Universitas Jambi.

1.5 Landasan Teori

Pendekatan Komunikasi Politik

Dalam konteks sistem politik, komunikasi politik berlangsung antara pihak penguasa dan masyarakat, baik melalui interaksi yang berhubungan dengan kebijakan politik maupun melalui pemberian dukungan atau pengajuan tuntutan dari masyarakat kepada penguasa.¹⁴ Komunikasi politik terbentuk atas gabungan dua istilah, yakni "komunikasi" dan "politik." Hubungan antara kedua istilah ini dianggap sangat signifikan dan khas, mengingat komunikasi memiliki peran yang krusial dalam dunia

¹⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman, pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 12–60.

politik. Meskipun demikian, teknik komunikasi telah memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai partisipasi politik.

Komunikasi politik mencakup seluruh bentuk komunikasi yang berlangsung dalam dan antar sistem politik serta hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Muller memandang komunikasi politik sebagai produk dari faktor-faktor seperti kelas sosial, proses sosialisasi, pola bahasa, dan hasil politik. Di sisi lain, Gallnor berpendapat bahwasanya komunikasi politik berfungsi sebagai sarana politik, yang terdiri atas beragam bentuk kontak sosial yang mendistribusikan data mengenai upaya kolektif dan hubungan kekuasaan.¹⁵

Didasarkan pada definisi-definisi sebelumnya, komunikasi politik dapat dipahami sebagai penyampaian pesan yang menekankan simbol atau informasi yang memiliki makna penting, yang berhubungan dengan atau mempengaruhi dinamika dan sistem politik. Komunikasi politik jenis ini dapat mencapai audiens atau target politik melalui berbagai saluran media massa, terutama melalui penggunaan APK.

Komunikasi politik mencakup atas lima komponen, yaitu pengirim (komunikator), pesan politik, saluran atau media politik, penerima atau audiens, serta dampak. Menurut Nimmo (1978),¹⁶ berbagai aspek pada komunikasi politik yakni:

¹⁵Effendy, Onong U, 2005. Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 21-25.

¹⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman, pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 12–60.

a. Sumber (komunikator)

Komunikasi politik melibatkan berbagai aktor dan institusi, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, serta partai politik. Dengan demikian, pihak yang bertindak sebagai pengirim atau komunikator politik yaitu individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi yang relevan atau signifikan dalam konteks politik. Contoh komunikator politik meliputi presiden, menteri, anggota DPR, KPU, gubernur, bupati, wali kota, politisi yang mewakili partai politik, pengelola LSM, serta berbagai kelompok lain yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan.¹⁷

b. Pesan politik

Pesan politik merujuk pada informasi yang dapat disampaikan melalui berbagai bentuk, baik tertulis maupun lisan, verbal maupun non-verbal, secara eksplisit maupun implisit, serta disadari maupun tidak disadari, yang di dalamnya terkandung muatan politik.

c. Saluran atau media politik

Media politik atau saluran komunikasi politik merupakan perantara dimanfaatkan para pengirim pesan untuk menyalurkan informasi politik terhadap masyarakat luas. Pada konteks ini, media politik mencakup berbagai bentuk APK, seperti bendera, spanduk, banner, dan lain-lain.

¹⁷ *Ibid*, hlm 15

d. Sasaran atau target politik

Kelompok target merujuk pada segmen masyarakat yang diharap memberikan kontribusi berupa partisipasi melalui keterlibatan aktif dalam Pemilihan Umum, khususnya dengan memberikan suara kepada partai politik atau kandidat tertentu.

e. Pengaruh atau efek komunikasi politik

Dampak yang diproyeksikan dari komunikasi politik ialah terbentuknya pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme pemerintahan serta kelompok politik, sehingga akan menstimulasi kontribusi rakyat untuk memberikan suara pada pemilihan umum.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm 16.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada studi ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang mana guna mengidentifikasi jawaban dugaan diawal studi serta dalam rangka menjadi pedoman pada tahapan yang akan diputuskan dalam rangka memberikan sikap atas informasi terkait baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah berlandaskan pada filsafat, seperti postpositivisme dilakukan terhadap objek alamiah, pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi atau kombinasi berbagai teknik. Proses analisis data bersifat induktif, di mana peneliti lebih mengutamakan pemahaman terhadap makna yang mendalam daripada menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi data kualitatif berbentuk kalimat.¹⁹ Adapun pendekatan kualitatif dipilih pada penelitian ini telah menggambarkan lebih jelas mengenai baliho sebagai media

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 225

kampanye untuk peningkatan kontribusi publik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan Kawasan yang memiliki tingkat akses jaringan internet yang cukup sulit. Kecamatan Purba menjadi daerah yang menarik untuk diteliti karena penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye masih sangat efektif untuk memengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi “Baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024” adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menganalisis secara kritis peran baliho sebagai salah satu bentuk alat peraga kampanye (APK) dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana baliho, sebagai media komunikasi politik dan juga menyoroti sejauh mana baliho mampu membentuk persepsi politik masyarakat, memengaruhi preferensi pemilih, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pemilu, terutama di

wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap media digital dan informasi berbasis teknologi.

1.7.4 Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli (*responden*), tanpa melalui perantara. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di tempat. Data utama penelitian ini adalah data terkait daftar pemilih tetap yang dipelohen dari KPU, Bawaslu Kabupaten Simalungun dan masyarakat pemilih yang berada di dapil Simalungun 1 Kecamatan Purba.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu informasi yang didapatkan dengan tidak langsung melalui perantara, seperti individu lain, media, atau dokumen. Data ini bersumber dari pihak kedua yang mendukung pengumpulan data penelitian.²⁰ Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapati dari beragam sumber, termasuk dokumen, buku, skripsi, artikel jurnal, internet, berita daring, serta wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun.

²⁰ *Ibid*, hlm. 225.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada studi ini untuk menentukan informan dipergunakan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan berdasarkan individu tau kriteria tertentu yang sangat relevan dengan topik penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan penggunaan baliho dalam kampanye politik.

Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini adalah:

No	Nama Informan	Jabatan
1	Fadly Hamdi Lubis	Ketua Divisi Teknis KPU
2	Boy Chando H. Purba	Anggota Bawaslu Kab. Simalungun
3	M. Chrismes Haloho	Anggota DPRD Kab. Simalungun
4	Radisna Silalahi	Calon anggota DPRD Kab. Simalungun
5	Ame Ovtasari Sumbayak	Masyarakat Huta Raja
6	Dominta Siboro	Masyarakat Bunga Sampang
7	Ismail Saragih	Masyarakat Purba Dolok
8	Sriani Malau	Masyarakat Urung Pane

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan informasi guna kepentingan riset ini, diterapkan sejumlah metode berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi sosial masyarakat Kecamatan Purba yang berkaitan dengan keberadaan baliho sebagai alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024. Pengamatan mencakup respons masyarakat terhadap isi, posisi, dan simbol-simbol pada baliho, baik dalam bentuk perhatian visual, percakapan spontan, maupun sikap non verbal. Observasi ini penting untuk menangkap dinamika sosial politik yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, termasuk bagaimana baliho membentuk persepsi publik, memicu diskusi politik, dan mendorong partisipasi pemilih di wilayah yang masih terbatas akses media digitalnya.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Purba, khususnya individu yang memiliki perhatian, keterlibatan, atau pengalaman langsung terkait keberadaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam Pemilu Legislatif 2024. Tujuannya adalah untuk menggali persepsi, pandangan, serta pengalaman informan terhadap efektivitas baliho dalam menyampaikan pesan politik dan mendorong partisipasi dalam pemilihan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan menggunakan panduan pertanyaan sebagai kerangka dasar, namun tetap memberikan

ruang yang fleksibel bagi responden untuk mengungkapkan opini, interpretasi, dan pengalaman pribadi mereka secara terbuka dan bebas.

c. Dokumentasi

Peneliti telah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, foto, dokumen resmi pemerintah terkait pemilu dan materi-materi lain yang relevan untuk mendukung analisis.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Teknik ini melibatkan proses kategorisasi, pengkodean, tabulasi, atau pengelompokan data sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.²¹ Fokus utama diarahkan pada efektivitas baliho dalam menjangkau masyarakat secara luas, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana keberadaan baliho di ruang publik memengaruhi kesadaran politik untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemilu.

²¹ Bungin dan Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 150.

a. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, proses pengumpulan data bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh melalui wawancara. Setelah tahap pengumpulan data selesai, data yang berkaitan dengan baliho akan mengalami proses reduksi untuk memperoleh informasi yang relevan terkait baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah menyusun data yang berstruktur ssesuatu yang telaah dirancang. Data disajikan dnegan tujuan mempermudah untuk dibaca serta disimpulkan.²² Melalui pencermatan sajian informasi ini akan memudahkan peneliti dalam mengkaji realita yang ada serta langkah yang nantinya dilaksanakan dalam penelitian baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik terhadap politik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2008, hlm. 123.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap penutupan yang berperan kunci pada sebuah studi, dengan tujuannya menginterpretasikan hasil temuan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Secara khusus, kesimpulan memberikan jawaban terhadap perumusan permasalahan yang ditentukan pada permulaan penelitian, menyimpulkan temuan-temuan yang ada berkenaan dengan baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik terhadap politik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada validitas dan keterandalan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Validitas data dijaga dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan, akurat, dan merepresentasikan kenyataan sosial di lapangan, khususnya terkait persepsi dan respons masyarakat terhadap baliho sebagai alat peraga kampanye.

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan data dengan memadukan berbagai sumber informasi, metode pengumpulan data, atau sudut pandang teoretis yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, seperti wawancara dengan masyarakat, anggota KPU, anggota bawaslu dan calon legislatif

(baik yang terpilih maupun tidak terpilih), untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai efektivitas baliho dalam memengaruhi partisipasi politik. Triangulasi juga dilakukan melalui penggunaan beragam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi langsung terhadap interaksi sosial di Kecamatan Purba, serta dokumentasi visual alat peraga kampanye.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang terletak di bagian timur provinsi ini. Secara administratif, ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Raya. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang khas.²³ Terletak di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500-1.000 meter di atas permukaan laut, Simalungun memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah.

Simalungun adalah wilayah asal suku Simalungun yang memiliki adat istiadat dan tradisi yang kuat. Bahasa Simalungun digunakan sehari-hari dan menjadi identitas budaya masyarakat. Upacara adat seperti *marsiadap* (upacara adat pembersihan) dan berbagai tarian tradisional sering dijadikan media pelestarian budaya dan juga menarik wisatawan. Ekonomi Kabupaten Simalungun sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian, terutama tanaman palawija, kopi, sayuran, serta perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, peternakan sapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, *Kabupaten Simalungun dalam Angka 2023*, (Pematangsiantar: BPS, 2023), hlm. 3.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mulai tumbuh sebagai upaya diversifikasi perekonomian.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 tercatat sekitar 1.051.845 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 237 jiwa per km². Struktur usia penduduk menunjukkan bahwa 66,76% berada dalam kelompok usia produktif (15–59 tahun), sementara 20,52% merupakan anak-anak (0–14 tahun) dan 12,73% berusia lanjut (60 tahun ke atas). Komposisi jenis kelamin penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 537.650 laki-laki dan 529.849 perempuan, dengan total keseluruhan mencapai 1.067.499 jiwa.²⁴ (BPS Kabupaten Simalungun 2024)

Kabupaten Simalungun, dengan karakteristik sosial budaya yang kuat dan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, menjadi wilayah strategis dalam pelaksanaan kampanye politik, termasuk penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye. Baliho sebagai media visual efektif untuk menyampaikan pesan politik karena mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk di kecamatan-kecamatan yang tersebar di wilayah dataran tinggi dan perbukitan seperti Simalungun. Mengingat masyarakat Simalungun memiliki identitas budaya yang kuat dan komunikasi sosial yang aktif, pemasangan baliho yang berisi visi, misi, dan program peserta pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik publik. Dengan

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. *Kabupaten Simalungun dalam Angka 2024*. Pematangsiantar: BPS Kabupaten Simalungun, 2024. Diakses dari <https://simalungunkab.bps.go.id/> pada 25 Mei 2025.

demikian, baliho tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam memberikan dukungan yang lebih terarah dan sadar pada pemilihan legislatif dan pemilihan umum. Pemasangan baliho yang tepat di lokasi strategis di Kabupaten Simalungun dapat memaksimalkan jangkauan pesan kampanye sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan demokrasi di tingkat daerah.

Kabupaten Simalungun memiliki 32 Kecamatan dengan Ibukota dan luas setiap Kecamatan yang berbeda. Berikut luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun:

Kecamatan	Ibukota	Luas Area
Silimakuta	Saribu Dolok	74,16
Pematang Silimakuta	Tiga Raja	79,68
Purba	Tiga Runggu	172,71
Haranggaol/Horison	Haranggaol	40,97
Dolok Pardamean	Dolok Pardamean	67,90
Sidamanik	Sari Matondang	80,88
Pematang Sidamanik	Sait Butu Saribu	137,80
Girsang Sipangan Bolon	Parapat	129,89
Tanah Jawa	Pematang Tanah Jawa	174,33
Hatonduhan	Buntu Bayu	336,26
Dolok Parimbuan	Tiga Dolok	148,62
Jorlang Hataran	Tiga Balata	93,70
Panei	Panei	77,96
Panombean Panei	Pematang Panombean	73,74
Raya	Pematang Raya	261,56
Dolog Masagal	Bah Bolon	105,77
Dolok Silau	Saran Padang	302,66
Silau Kahean	Negeri Dolok	228,74

Raya Kahean	Sindar Raya	204,89
Tapian Dolok	Sinaksak	119,89
Dolok Batu Nanggar	Sarbelawan	106,91
Siantar	Dolok Mariawan	73,99
Gunung Malela	Dolok Malela	95,74
Gunung Maligas	Silau Bayu	51,39
Hutabayu Raja	Hutabayu	191,43
Jawa Maraja Bah Jambi	Jawa Maraja	38,97
Pematang Bandar	Pematang Bandar	88,16
Bandar Huluan	Naga Jaya I	107,33
Bandar	Pardagangan	100,69
Bandar Masilam	Bandar Masilam	91,22
Bosar Maligas	Bosar Maligas	285,43
Ujung Padang	Ujung Padang	228,49
Simalungun	Raya	4.372,50

Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Simalungun

2.1.1 Sejarah Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nama “Simalungun” berasal dari dua kata dalam bahasa daerah, yaitu “Sima” yang berarti tempat atau wilayah, dan “Lungun” yang berarti sepi atau sunyi. Nama ini diyakini muncul dari gambaran awal daerah tersebut yang dulunya berupa hutan lebat dan belum banyak dihuni manusia. Secara geografis, Kabupaten Simalungun memiliki letak strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten atau kota lainnya, termasuk Kota Pematangsiantar yang secara historis pernah menjadi pusat pemerintahan kabupaten ini.

Sebelum masuknya pengaruh kolonial Belanda, wilayah Simalungun dihuni oleh masyarakat asli yang menganut sistem pemerintahan tradisional berbasis kerajaan.

Terdapat empat kerajaan besar yang dikenal dengan sebutan "*Raja Maropat*", yaitu Kerajaan Raya, Kerajaan Purba, Kerajaan Silou, dan Kerajaan Tanoh Jawa. Masuknya pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 membawa perubahan besar terhadap struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Simalungun. Belanda menggunakan strategi politik "*devide et impera*" (memecah belah dan menguasai), serta menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) dengan melibatkan raja-raja lokal dalam sistem kolonial. Selain itu, Belanda juga membuka lahan-lahan perkebunan seperti teh, tembakau, dan karet di wilayah Simalungun, yang turut mendatangkan pekerja dari luar daerah, terutama dari Jawa dan Tapanuli. Hal ini menyebabkan terjadi percampuran budaya dan demografi di kawasan tersebut.

Kabupaten Simalungun dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Ibu kotanya, Raya merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Selain itu, wilayah ini dikenal memiliki lahan yang subur dan iklim yang sejuk menjadikan wilayah ini cocok untuk budidaya padi, jagung, sayur-mayur, serta komoditas unggulan seperti kopi, teh, karet, dan kelapa sawit.

2.1.2 Letak Wilayah Dan Topografi

Kabupaten Simalungun berada di bagian timur Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi di sebelah barat, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai di sebelah timur, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir di

sebelah selatan, serta Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Serdang Bedagai di sebelah utara.

Topografi Kabupaten Simalungun tergolong bervariasi, terdiri dari dataran rendah, perbukitan, hingga daerah pegunungan. Wilayah bagian timur dan utara umumnya berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0–500 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan wilayah bagian barat dan selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang mencapai ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, terutama di kecamatan seperti Raya, Silimakuta, dan Sidamanik.

Keadaan topografi ini memengaruhi iklim mikro dan pola penggunaan lahan. Wilayah dataran tinggi cenderung beriklim sejuk dan sangat cocok untuk perkebunan teh, kopi, dan hortikultura, sementara dataran rendah lebih banyak dimanfaatkan untuk persawahan, kebun kelapa sawit, dan pemukiman. Variasi topografi ini juga menjadikan Simalungun kaya akan potensi wisata alam, seperti air terjun, perbukitan, dan panorama Danau Toba dari dataran tinggi.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Purba

2.2.1 Letak Wilayah Geografis Kecamatan Purba

Kecamatan Purba merupakan salah satu dari 32 kecamatan yang berada di wilayah administrative Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kecamatan Purba berada di bagian Tengah timur Kabupaten Simalungun. Wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain di Simalungun, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamatang Silimahuta, sebelah selatan

berbatasan langsung dengan Kecamatan Haranggaol Horison, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Raya dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah perbukitan dan Danau Toba. Secara topografi, Kecamatan Purba didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi antara 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah ini memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur, sangat mendukung untuk kegiatan pertanian dan Perkebunan.



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

Kecamatan Purba merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Indonesia, yang terletak di bagian tengah dan tenggara wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, kecamatan ini berada di kawasan dataran tinggi Bukit Barisan, yang menjadikannya wilayah dengan bentuk permukaan berbukit dan suhu udara yang relatif sejuk. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan nilai-nilai

budaya Batak Simalungun dan memiliki ikatan sosial masyarakat yang kuat. Dengan luas wilayah yang cukup besar, wilayah Kecamatan Purba 172,71 km terdiri dari²⁵:

1. Hinalang 6,51 km (3,77)
2. Tiga Runggu 11,00 km (6,37)
3. Purba Tengah 10,04 km (5,81)
4. Pematang Purba 24,34 km (14,09)
5. Purba Sipingingan 12,43 km (7,20)
6. Urung Purba 15,27 km (8,84)
7. Tano Tinggir 5,49 km (3,18)
8. Purba Dolok 4,76 km (2,76)
9. Saribu Jandi 25,20 km (14,59)
10. Huta Raja 32,20 km (18,64)
11. Nagori Tengah 6,31 km (3,65)
12. Urung Pane 10,88 km (6,30)
13. Bunga Sampang 2,43 km (1,41)
14. Bandar Sauhur 5,86 km (3,40)

(BPS Kabupaten Simalungun 2024)

Kecamatan Purba terletak pada ketinggian 751-1.400 meter di atas permukaan laut dengan jarak ± 19 km dari Ibukota Kabupaten Simalungun. Luas wilayah

²⁵Pemerintah Kabupaten Simalungun, *Sejarah dan Profil Kabupaten Simalungun*, (Simalungun: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun, 2022), hlm. 4–6.

Kecamatan Purba adalah 172,71 km² dengan kepadatan penduduk rata-rata 140 Jiwa Km². Kecamatan Purba berbatasan langsung dengan kecamatan yaitu di Sebelah Utara Kecamatan Dolok Silou, Sebelah Selatan Kecamatan Dolok Pardamean, Sebelah Barat Kabupaten Silimakuta, Sebelah Timur Kecamatan Raya. Kecamatan Purba ini memiliki lahan yang sangat subur untuk bidang pertanian dan perkebunan. Penduduknya mayoritas masyarakat Kecamatan Purba didominasi oleh suku Simalungun, namun juga terdapat suku-suku lain seperti Karo, Toba, Jawa, dan Tionghoa, yang menunjukkan keragaman budaya dan sosial di wilayah ini. Yang sebagian besarnya bekerja sebagai petani atau di sektor Perkebunan. Sektor ekonomi utama meliputi padi, jangung, jeruk, sayuran dan lainnya. (simalungunkab.bps.go.id)

Di Kecamatan Purba, penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dan promosi menunjukkan dominasi yang signifikan dibandingkan media kampanye lainnya. Baliho yang berukuran besar dan mudah terlihat dari jarak jauh, banyak ditemukan di titik-titik strategis seperti simpang jalan, dekat pusat pemerintahan nagori, pasar tradisional, dan kawasan perlintasan utama.

2.2.2 Profil Kependudukan Kecamatan Purba

Kecamatan Purba, yang terletak di Kabupaten Simalungun, memiliki jumlah penduduk sebanyak 29.776 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk sebesar 172,40 km². Nagori atau kelurahan yang terpadat di Kecamatan ini adalah Kelurahan Purba yang dihuni 463,18 penduduk per kilometer persegi. Nagori atau desa Bunga Sampang merupakan desa terkecil di kecamatan ini. Sementara itu, kepadatan

penduduk di Nagori atau Desa Huta Raja sebanyak 43,29 orang per kilometer persegi. Yang terdiri dari sekitar 15.036 laki-laki dan 14.740 perempuan, Penduduk Kecamatan Purba tersebar di 14 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Tiga Runggu yang mencapai 5.095 jiwa, diikuti oleh Pematang Purba dengan 3.215 jiwa.

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hinalang	1.441	1.442	2.883
Tiga Runggu	2.600	2.495	5.095
Purba Tongah	916	882	1.798
Pematang Purba	1.648	1.567	3.215
Purba Sipinggian	1.238	1.248	2.486
Urung Purba	1.197	1.167	2.364
Tanoh Tinggir	702	648	1.350
Purba Dolok	817	842	1.659
Saribu Jandi	913	860	1.773
Huta Raja	707	687	1.394
Nagori Tongah	876	883	1.759
Urung Pane	1.165	1.214	2.379
Bunga Sampang	345	340	685
Bandar Sauhur	471	465	936
Purba	15.036	14.740	29.776

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Purba

Sebagian besar penduduk Kecamatan Purba berada pada rentang usia produktif, yakni 15 hingga 59 tahun, yang merupakan kelompok usia potensial dalam partisipasi politik maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Proporsi usia produktif ini menggambarkan tingginya kapasitas tenaga kerja serta potensi audiens aktif dalam proses kampanye politik di daerah tersebut. Sementara itu, kelompok usia muda (0–20 tahun) juga cukup besar, menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan

dan perlunya pendekatan edukatif dalam menyampaikan pesan politik ke keluarga secara keseluruhan.

Sebaran penduduk Kecamatan Purba tersebar di berbagai desa dengan tingkat kepadatan yang beragam, tergantung pada faktor geografis dan ketersediaan infrastruktur. Beberapa desa yang berada di daerah dengan akses terbatas terhadap jaringan komunikasi digital menjadikan media tradisional, seperti baliho, tetap relevan dan efektif sebagai sarana penyampaian pesan politik. Selain itu, keberagaman etnis yang terdiri dari suku Simalungun, Batak Toba, Karo, Jawa, dan etnis lainnya menciptakan dinamika sosial yang khas, di mana kedekatan emosional, hubungan kekeluargaan, dan interaksi komunitas menjadi kunci dalam proses komunikasi politik.

Secara etnis, masyarakat Kecamatan Purba didominasi oleh suku Simalungun, namun juga terdapat suku-suku lain seperti Karo, Toba, Jawa, dan Tionghoa, yang menunjukkan keragaman budaya dan sosial di wilayah ini. Dari segi agama, mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, diikuti oleh Islam dan Buddha. Kecamatan Purba terdiri dari 14 desa dan nagori, yang menjadi unit pemerintahan terkecil. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya di sektor pertanian hortikultura, seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan kopi.

Baliho memiliki peran yang cukup dominan dalam dinamika politik di Kecamatan Purba. Sebagai salah satu alat peraga yang sangat mudah untuk dikenali, baliho ini digunakan secara luas oleh para calon anggota legislatif untuk menyampaikan visi, misi, serta citra diri mereka kepada masyarakat. Penempatan

baliho di titik-titik strategis seperti pasar, persimpangan jalan, dan pusat keramaian desa menjadi sarana komunikasi politik yang efektif. Masyarakat Kecamatan Purba yang memiliki latar belakang agraris menunjukkan respons positif terhadap kampanye berbasis visual ini. Baliho dengan desain yang menarik dan pesan yang jelas mampu menarik perhatian warga, bahkan masyarakat yang belum aktif mengikuti proses politik.

2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Purba

Di Kecamatan Purba, jaringan telekomunikasi seluler belum merata. Beberapa area masih mengalami blank spot, terutama di daerah perbukitan dan pedesaan, yang menyebabkan sinyal telepon seluler tidak stabil atau bahkan tidak tersedia. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan komunikasi digital dan internet.

Kondisi sarana dan prasarana jaringan internet di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, secara umum masih tergolong terbatas dan belum merata di seluruh wilayah desa. Meskipun beberapa desa yang berada di pusat kecamatan atau di jalur utama telah terjangkau oleh jaringan internet berbasis seluler dan sinyal 4G, sebagian besar desa lainnya, terutama yang berada di daerah perbukitan atau pelosok, masih menghadapi keterbatasan akses sinyal yang stabil. Banyak wilayah yang hanya memiliki jaringan 2G atau bahkan blank spot, sehingga masyarakat sulit untuk mengakses layanan digital secara optimal, baik untuk kebutuhan pendidikan, ekonomi, maupun informasi politik. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kualitas

komunikasi masyarakat dengan dunia luar, tetapi juga secara langsung memengaruhi efektivitas penyebaran informasi selama masa kampanye pemilu.

Menurut publikasi Podes/BPS Kabupaten Simalungun tahun 2022, setiap nagori di Kecamatan Purba umumnya memiliki:

- Kantor Pos atau layanan ekspedisi, meski jumlahnya bervariasi antar nagori.
- Tower/BTS seluler, yang berfungsi menyuplai sinyal telepon dan data seluler.
- Operator layanan seluler terjangkau, tergantung lokasi; beberapa nagori memiliki akses ke sinyal 2G–4G, sementara nagori lain masih terbatas.
- Distribusi radio lokal dan televisi nasional cenderung bersifat sporadis, tidak merata setiap nagori, karena faktor topografi dan fasilitas infrastruktur yang terbatas

Kantor Pos / Jasa Ekspedisi	Tersedia di beberapa nagori, umumnya pusat pelayanan administrasi desa .
Tower/BTS Seluler	Ditemukan di sebagian nagori; cakupan sinyal bergantung pada topografi dan lokasi menara.
Layanan Operator Seluler	Nagori dengan tower memiliki sinyal 2G-4G; nagori terisolasi masih mengalami blank spot
Sinyal Radio & Televisi	Ada akses siaran, namun tidak menyeluruh; beberapa nagori sulit menerima sinyal dengan jelas

Tabel 2.3 Perbandingan Fasilitas Antar Desa

Data dari BPS menunjukkan bahwa prasarana komunikasi di Kecamatan Purba belum merata. Keberadaan tower seluler dan layanan pos tidak menjangkau setiap

nagori secara optimal. Jangkauan siaran radio dan televisi pun terbatas tergantung kondisi geografis. Dengan kondisi tersebut, alat kampanye tradisional seperti baliho tetap menjadi media utama dalam menyampaikan informasi publik dan politik di wilayah ini. Keterbatasan akses terhadap teknologi komunikasi dan penyiaran digital di Kecamatan Purba menjadikan baliho sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien untuk menjangkau masyarakat. Penggunaan baliho memungkinkan informasi disampaikan secara langsung dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa bergantung pada infrastruktur digital yang belum merata.

2.3 Gambaran Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Dalam skala lokal, Pemilu juga menjadi barometer tingkat partisipasi politik masyarakat serta cerminan dari kualitas demokrasi di daerah. Kecamatan Purba, yang terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, turut ambil bagian dalam agenda nasional ini.

Kecamatan Purba merupakan wilayah perbukitan yang terdiri dari berbagai desa atau nagori, dengan komposisi penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Secara sosial, masyarakatnya masih sangat terikat pada struktur kekerabatan, adat istiadat, dan tokoh lokal. Faktor-faktor ini

berperan besar dalam membentuk perilaku politik masyarakat, termasuk dalam proses pengambilan keputusan saat pemilu. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya dilihat sebagai mekanisme politik formal, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya dinamika hubungan antara masyarakat, tokoh adat, partai politik, dan calon legislatif.

Pemilu 2024 di Kecamatan Purba dilaksanakan dalam kondisi yang relatif aman dan tertib. Namun, tantangan tetap muncul, terutama terkait partisipasi pemilih yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih terbatas, serta tingginya angka perantauan warga yang bekerja atau menempuh pendidikan di luar daerah. Hal ini menyebabkan sebagian pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya secara optimal.

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Simalungun dibagi ke dalam enam Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Pembagian dapil ini didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, dan pemerataan keterwakilan politik. Dapil Simalungun 1 mencakup wilayah kecamatan Raya, Raya Kahean, Pamatang Silimahuta, Purba, Silimakuta, Dolok Silau, dan Haranggaol Horison. Wilayah ini umumnya berada di dataran tinggi dan memiliki karakteristik masyarakat yang masih sangat erat dengan adat istiadat, serta menjadi salah satu basis kuat partisipasi politik berbasis kekerabatan dan tokoh lokal.

Sementara itu, Dapil Simalungun 2 terdiri atas kecamatan Pane, Jorlang Hataran, Girsang Sipangan Bolon, Sidamanik, dan Dolok Pardamean, yang sebagian

berada di kawasan wisata Danau Toba dan memiliki penduduk yang heterogen secara etnis dan profesi. Dapil Simalungun 3 meliputi Panei, Panombeian Panei, dan Purba Dolok merupakan wilayah pertanian dengan komunitas pedesaan yang kuat. Kemudian, Dapil Simalungun 4 terdiri atas Bandar Huluan, Dolok Batu Nanggar, Ujung Padang, dan Tapan Dolok. Wilayah ini merupakan kombinasi antara kawasan pertanian dan pemukiman semi-perkotaan yang berkembang.

Dapil Simalungun 5 mencakup Bandar Masilam, Bandar, Bosar Maligas, dan Ujung Serdang wilayah dengan kepadatan cukup tinggi dan aktivitas ekonomi yang dinamis, termasuk industri kecil dan perdagangan. Terakhir Dapil Simalungun 6 meliputi kecamatan Gunung Malela, Gunung Maligas, Hatonduhan, Jawa Maraja Bah Jambi, Tanah Jawa, dan Hutabayu Raja. Dapil ini merupakan wilayah dataran rendah dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat dan penduduk yang relatif padat.

Secara keseluruhan, keenam dapil ini merepresentasikan keragaman geografis, sosial, dan budaya yang ada di Kabupaten Simalungun. Total kursi DPRD yang diperebutkan di tingkat kabupaten berjumlah 50 kursi, yang distribusinya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan karakteristik masing-masing dapil. Pembagian dapil ini menjadi dasar penting dalam strategi pemenangan partai politik dan calon legislatif di tingkat lokal.

Pada Pemilihan Umum 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun 1 yang mencakup Kecamatan Purba, Raya, Raya Kahean, Pamatang Silimahuta, Silimakuta, Haranggaol Horison, Dolok Silau, Silou Kahean, dan Dolok Masagal — menjadi salah

satu dapil yang cukup kompetitif di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, terdapat sekitar 86 hingga 89 calon legislatif yang bertarung memperebutkan 9 kursi DPRD Kabupaten Simalungun dari dapil ini. Para calon tersebut berasal dari sedikitnya 11 partai politik, dengan setiap partai umumnya mengajukan antara 4 hingga 9 calon sesuai kuota maksimal.

Selain itu, dalam Pemilu Legislatif, Kecamatan Purba masuk ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun I Kabupaten Simalungun, yang menjadi medan persaingan bagi partai politik dan calon legislatif tingkat kabupaten. Keberadaan alat peraga kampanye (APK), khususnya baliho, sangat menonjol di wilayah ini. Baliho tidak hanya berfungsi sebagai media promosi calon, tetapi juga menjadi alat komunikasi visual yang berusaha membangun kedekatan psikologis antara calon legislatif dan masyarakat. Keberhasilan kampanye dalam bentuk baliho sering kali ditentukan oleh faktor lokalitas, kedekatan kultural, dan kekuatan jaringan sosial di desa-desa.

Berdasarkan data resmi Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Purba tercatat sebanyak 20.221 pemilih yang tersebar di empat belas nagori. Terdapat variasi jumlah pemilih yang cukup mencolok antar nagori, di mana Nagori Tiga Runggu menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 3.547 orang, sementara nagori dengan jumlah pemilih paling sedikit adalah Bunga Sampang dengan 492 orang.

Nama Desa	Jumlah DPT 2019	Jumlah DPT 2024
Purba Tengah	1.072	1.273
Pematang Purba	1.605	2.083
Urung Purba	1.375	1.575
Purba Sipingga	1.463	1.741
Hinalang	1.602	2.001
Purba Dolok	968	1.100
Tano Tinggir	807	959
Tiga Runggu	2.457	3.547
Saribu Jandi	970	1.257
Huta Raja	799	884
Bandar Sauhur	562	667
Bunga Sampang	396	492
Nagori Tengah	811	1.110
Urung Pane	1.263	1.532
Total	16.150	20.221

Tabel 2.3 Jumlah DPT Kecamatan Purba

Kecamatan Purba, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari area pedesaan dan perbukitan di Kabupaten Simalungun, masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur komunikasi modern. Jaringan telepon seluler di beberapa

bagian kecamatan belum merata, dengan area blank spot yang mengakibatkan sinyal seringkali lemah atau bahkan tidak tersedia secara konsisten. Begitu pula dengan akses internet yang masih terbatas, baik dari segi kecepatan maupun ketersediaan jaringan 4G atau 5G. Hal ini menyebabkan penggunaan media digital untuk kampanye politik atau penyebaran informasi publik masih belum efektif menjangkau seluruh masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Baliho Sebagai Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Di Kecamatan Purba Tahun 2024

Pemilihan umum secara langsung dipandang sebagai tolak ukur kadar demokrasi lokal suatu Negara. Pemilu secara langsung dipandang sebagai mekanisme rekrutmen politik yang demokratis yang lebih banyak memberikan peluang partisipasi yang lebih besar kepada masyarakat untuk menentukan para pemimpinnya. Mekanisme rekrutmen politik melalui pemilu secara langsung memerlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan anggota Legislatif.²⁶ Sebagai Upaya untuk mensosialisasikan serta mengenalkan calon kandidat anggota legislatif kepada masyarakat secara luas, alat peraga kampanye merupakan suatu alat yang sangat efektif untuk digunakan.

Dalam konteks komunikasi politik modern, alat peraga kampanye (APK) dipahami sebagai salah satu bentuk media komunikasi politik visual yang secara strategis digunakan oleh kandidat maupun partai politik untuk menyampaikan berbagai pesan politik kepada khalayak luas, terutama pemilih. APK tidak hanya berfungsi sebagai penanda visual keberadaan kandidat dalam ruang publik, tetapi juga sebagai simbol representasi politik yang membentuk persepsi dan kesan awal masyarakat

²⁶ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 263.

terhadap figur calon legislatif. Bentuk APK sangat beragam, mencakup baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, flayer, hingga banner digital, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam hal jangkauan, durasi tampilan, dan tingkat efektivitas dalam menarik perhatian masyarakat. Misalnya, baliho yang berukuran besar dan diletakkan di tempat strategis mampu menciptakan kesan otoritatif dan dominan, sedangkan flayer dan poster lebih fleksibel dan mudah disebarluaskan secara langsung dari pintu ke pintu.

Menurut Cangara, media komunikasi politik seperti APK memiliki tiga fungsi utama: menyebarluaskan informasi politik, membentuk opini publik, serta mempengaruhi perilaku politik pemilih. Dengan demikian, APK tidak hanya sekadar alat promosi visual, tetapi merupakan instrumen penting dalam dinamika demokrasi elektoral yang berfungsi membangun komunikasi dua arah secara tidak langsung antara kandidat dan masyarakat pemilih.²⁷

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, khususnya di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Purba, yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses terhadap media digital dan infrastruktur informasi modern, keberadaan APK menjadi sangat vital. APK berperan sebagai media utama yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung dan konsisten, khususnya kalangan masyarakat desa, lansia, atau kelompok marginal yang belum terakses media sosial dan internet secara merata.

²⁷ Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hal. 102

Selain itu, karena APK hadir secara fisik di ruang-ruang publik seperti di depan rumah ibadah, pasar tradisional, jalan utama, dan pusat-pusat kegiatan warga, ia memiliki keunggulan dalam membangun eksposur visual yang terus-menerus. Dengan demikian, pesan politik yang dibawa melalui APK lebih mudah tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan partisipasi politik dalam pemilu.

Secara kondisional selain berfungsi dalam memberikan pemahaman tentang keberadaan suatu produk, alat peraga kampanye sekaligus menjadi “mediasi dalam melihat para calon kandidat untuk secara suka rela memberi partisipasi memilih atau mencoblos siapa pemimpin yang cocok jadi pemimpin yang layak bagi masyarakat”. Artinya, melalui alat peraga kampanye yang disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Simalungun memberikan visi misi dan nama para calon kandidat (termasuk alat peraga kampanye dengan isi pesan politik) diupayakan agar kebutuhan pemilih dapat dicapai. Sebagaimana Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” KPU Kabupaten Simalungun mengklasifikasikan baliho atau alat peraga kampanye pada Undang-undang No. 8 Tahun 2012 menyebutkan kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga. Ketentuan tersebut menjadi fokus peneliti karena baliho menjadi salah satu alat peraga yang dinilai sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat disamping fasilitas kampanye lainnya. Alat peraga

kampanye diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 15 Tahun 2023 tentang pencalonan pemilihan Presiden Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD yaitu baliho, spanduk dan umbul-umbul.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Fadly Hamdi Lubis sebagai berikut:

Penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam Pemilu 2024 diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Pemasangan baliho harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KPU bersama pemerintah daerah dan Bawaslu, baik dari segi jumlah, ukuran, maupun lokasi pemasangan. Baliho dilarang dipasang di tempat-tempat terlarang seperti rumah ibadah, fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, dan tempat umum yang membahayakan. Selain itu, peserta pemilu hanya diperbolehkan memasang baliho di lokasi yang telah ditentukan dalam zona kampanye visual. KPU juga memberikan fasilitas baliho secara terbatas kepada setiap peserta pemilu, dengan desain yang harus diserahkan paling lambat lima hari sebelum masa kampanye dimulai.²⁸

Setiap penyelenggaraan pemilihan, para kandidat atau calon anggota legislatif yang berjuang di pesta lima tahunan tersebut selalu menyiapkan berbagai strategi dalam menggaet massa untuk memilihnya di hari pencoblosan. Berbagai cara dan upaya dikerahkan, demi satu suara dari tiap individu yang ada di lingkup masyarakat. Strategi kampanye memiliki beragam macam bentuk baik fisik maupun non fisik dibayar maupun tidak dibayar.

²⁸ Wawancara dengan Fadly Hamdi Lubis, anggota KPU Kabupaten Simalungun, Kecamatan Purba, pada tanggal 17 Februari 2025 di Kantor KPU Simalungun.



Gambar 3.1 Baliho Calon Anggota Legislatif

3.1.1 Komunikator Politik

Proses penempatan alat peraga kampanye merupakan suatu bentuk yang menggunakan pendekatan-pendekatan finansial, dimana biaya akan dikeluarkan oleh kandidat untuk memproduksi alat iklan seperti baliho sendiri, dalam proses desain, produksi baliho, dan penempatan di berbagai tempat yang telah ditentukan, terutama di Lokasi-lokasi yang dinilai strategis. Strategi ini mengutamakan pembentukan citra positif dari sosok kandidat dimana simbol dan gambar/desain dimaksimalkan sebaik mungkin serta harus dapat membangkitkan sentiment antar pemilih dengan kandidat calon. Pemilih cenderung memilih kontestan yang memiliki arah yang sama dengan yang merekan rasakan.

Begitupun jika dilihat dari praktik pemasangan dan penempatan baliho sebagai alat peraga kampanye yang dilakukan oleh kandidat legislatif Kabupaten Simalungun,

dapat dilihat bahwa baliho sebagai alat peraga kampanye masih merupakan unsur penting dalam proses strategi pemenangan kandidat. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang merupakan anggota DPRD yang menang dan calon anggota DPRD yang kalah dalam *Pileg* 2024 Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun yaitu M. Crismes Haloho merupakan kandidat yang saat ini menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar), Radisna silalahi merupakan kandidat yang kalah bersaing duntuk merebutkan kursi panas anggota DPRD berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). menyatakan bahwa penempatan atau pemasangan baliho sebagai APK masih sangat efektif dalam penginformasian diri mereka kepada khalayak pemilih. Keduanya kompak akan *statement* masih pentingnya baliho dalam proses kampanye.



Gambar 3.2 alat peraga kampanye calon legislatif

Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Crismes Haloho, yang menyatakan:

Menurut saya baliho sebagai APK masih diperlukan dalam pesta demokrasi, saya melihat walaupun kadang terkesan semrawut, namun keberadaanya menjadi ujung tombak para caleg dalam memperkenalkan dirinya serta menjadi pendidikan politik kepada masyarakat. Coba jikalau baliho tidak ada,

bagaimana masyarakat dapat mengetahui seseorang kandidat mencalonkan diri, bagaimana saya misalnya dapat mendapatkan suara dari masyarakat.²⁹

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Radisna Silalahi keberadaan Apk tidak dapat dikesampingkan dalam proses politik para kandidat pemilu, berikut kutipan wawancaranya:

Ya kita tentu masih memerlukannya, khususnya kami dari Partai Solidaritas Indonesia memang ini menjadi bagian dari strategi partai untuk memperkenalkan kandidat di tengah masyarakat, kita tidak dapat menafikan keberadaan baliho sebagai APK walaupun perkembangan jaman semakin maju. Dan juga saya sebagai calon legislatif yang kalah masih sangat memerlukan strategi dalam menggunakan baliho, spanduk sebagai alat peraga kampanye saya jika saja saya mencalon di pemilu yang akan datang.³⁰

Terdapat penemuan menarik dari hasil wawancara di lapangan, penempatan APK seperti baliho atau spanduk di jalan-jalan atau tempat-tempat umum lainnya menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai keseriusan seseorang kandidat dalam menghadapi pemilihan. Seperti pernyataan dari Ismail Saragih masyarakat Purba Dolok, Kecamatan Purba, dia berujar semakin banyaknya APK dari sosok kandidat maka caleg itu serius tidak main-main dalam menghadapi pemilihan. Berikut hasil wawancaranya:

Kadang kita melihat, bahwasanya ada calon terkadang tidak pasang baliho atau spanduk, jangankan itu, terkadang kartu nama aja tidak ada dibagi-bagi kepada kami masyarakat, kan tidak sreg dilihat. Bagaimana akan ada hasil jika kalau tidak ada usaha, dari segi itu saja kita menilai kalau keseriusan seseorang caleg itu sendiri dalam menghadapi pemilihan.

²⁹ Wawancara Bersama bapak Drs.M Chrimes Haloho, anggota DPRD terpilih di Kabupaten simalugun, pada tanggal 10 Februari 2025.

³⁰ Wawancara Bersama ibu Radisna Silalahi, calon anggota legislatif Kabupaten Simalungun, pada tanggal 15 Februari 2025.

Strategi penempatan dan prosuksi baliho juga merupakan hal menarik dimana para kandidat memiliki cara dan strategi masing-masing. Penempatan pendistribusian dilakukan secara seksama serta cermat, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada calon anggota legislatif dalam Pileg 2024, maka berikut beberapa strategi yang dilakukan para calon legislatif tersebut dalam proses pemasangan alat peraga kampanye agar lebih efektif:

1. Pemetaan awal terhadap masyarakat

Dalam hal ini para kandidat menilai dan melakukan survei terhadap kondisi masyarakat, bagaimana ekonomi masyarakat, sikap politik mereka apakah mereka pemilih yang irrasional (masyarakat melek politik rendah, pasif politik), rasional (masyarakat sadar dan aktif politik serta biasanya terpelajar), emosional, semua itu dirumuskan agar dapat dibentuk formula atau strategi khusus dalam proses kampanye di tempat tersebut, hal ini dilakukan karena untuk mengatasi heterogenya (majemuk) kondisi sosial masyarakat dan tidak salah kaprah dalam proses politik di suatu lokasi nantinya.

2. Relasi

Jaringan kekerabatan, persaudaraan atau kedekatan dengan sosok individu menjadi peluang besar para kandidat untuk melakukan proses politik dengan cepat dan efektif, lewat pembicaraan mulut ke mulut, atau reunion maka proses kampanye dirasa akan lebih mudah dan mengikat orang. Perbagian kartu nama, baju, kalender atau

sejenisnya biasanya dapat dilakukan melalui kedekatan emosional ini, melalui sanak saudara, famili, keluarga, atau teman seperkumpulan.

3. Penempatan APK yang strategis

Penempatan Apk seperti baliho, spanduk, bendera, merupakan salah satu metode yang penting guna menggaet masyarakat untuk memilih dirinya. Biasanya tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat di desa-desa, seperti di sekitaran warung kopi, diluar lingkungan gereja menjadi target para kandidat dan timnya untuk menempatkan baliho.

4. Penentuan branding diri yang tepat

Ketepatan pemilihan branding diri merupakan cara para kandidat dalam “menjual” apa yang menjadi daya tarik, baik itu dari sisi kepartaian atau dari dirinya sendiri. Branding politik menjadi salah satu strategi penting dalam upaya menarik simpati dan dukungan masyarakat pada Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Setiap partai politik berupaya menonjolkan keunggulan masing-masing melalui alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan poster yang tersebar di ruang publik. Beberapa partai menggunakan branding program dan identitas partai sebagai nilai jual utama. Partai-partai nasional seperti PDI Perjuangan menonjolkan citra sebagai partai wong cilik dan pendukung pemerintahan, sementara Partai Gerindra banyak memanfaatkan ketokohan Prabowo Subianto sebagai figur nasional yang kuat. Tak jarang pula partai seperti Partai Golkar

menampilkan identitas sebagai partai berpengalaman yang telah lama berkiprah di pemerintahan.

Di sisi lain, strategi ketokohan politik juga menjadi salah satu taktik yang dominan. Banyak kandidat legislatif di Kecamatan Purba memanfaatkan popularitas tokoh nasional, seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dengan menampilkan foto bersama atau menempatkan gambar tokoh tersebut dalam desain APK mereka, meskipun kadang berasal dari partai yang berbeda. Misalnya, ada kandidat dari partai koalisi lain yang tetap menyisipkan gambar Prabowo untuk mendongkrak elektabilitas karena melihat adanya kecenderungan dukungan masyarakat Simalungun terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.



Gambar 3.3 baliho di tempat yang sering dilewati masyarakat

Hal ini disampaikan oleh Romasdon Saragih dalam wawancaranya:

Ya politik ini kan luwes, kita (kandidat) bermain sesuai apa yang ada di masyarakat, misalnya dalam hal ini perihal branding kita, kita lihat, terkadang ada yang bisa kita jual partai kita, atau malah ketokohan tertentu. Semua itu berdasarkan pemetaan kita dalam merumuskan strategi APK.³¹

³¹ Wawancara Bersama Romasdo Saragih, Salah satu tokoh di kecamatan Purba, pada tanggal 16 Februari 2025.

Analogi yang terbentuk dari pernyataan diatas yaitu dinamisme politik yang menjadi alasan mengapa terdapat perbedaan yang kentara dalam berpolitik, politik dijadikan sebagai pasar dan masyarakat menjadi konsumen, pasar tetap melihat bagaimana permintaan dan selera dari konsumen.

Proses produksi maupun pendistribusian APK tentu memakan biaya yang tidak murah dan memakan waktu yang cukup lama. Adapun anggaran yang dihabiskan rata rata mencapai kisaran 30-60 juta rupiah berdasarkan informasi dari wawancara yang telah dilakukan. Biaya itu telah termasuk biaya desain, produksi, serta pemasangan oleh tim kampanye dari masing-masing kandidat, serta dominannya biaya pemasangan merupakan yang paling memakan anggaran terbanyak. Dalam hal ini, meski APK terhitung tidak ekonomis dan memakan waktu, serta kehadiran media sosial yang murah, memiliki jangkauan luas dalam menggaet perhatian masyarakat tentu menjadi alternatif tersendiri. Penggunaan media selain APK seperti dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hanya dilakukan oleh Romasdon Saraagih melalui akun Facebook dirinya dengan nama pengguna Romasdon Saraagih, sedangkan untuk dua kandidat lainnya tidak ditemukan promosi dengan menggunakan media sosial.

Kebutuhan terhadap baliho sebagai APK dalam promosi kandidat yang bertanding di kancah pemilihan masih tinggi dengan kondisi masyarakat Kecamatan Purba yang masih mengedepankan nilai kearifan lokal dalam proses politik dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, musyawarah. Masyarakat lebih suka terhadap cara kampanye dengan temu ramah, silaturahmi, kegiatan sosial yang dilakukan kandidat,

daripada penggunaan promosi media sosial. Penetrasi penggunaan teknologi dalam kampanye kandidat berada dari pasar yang berbeda dengan preferensi yang masih minim.

Komunikator Politik dalam konteks ini adalah para calon legislatif yang mencalonkan diri pada Pemilu 2024 di Kecamatan Purba. Berdasarkan hasil wawancara, para kandidat seperti M. Crismes Haloho, Radisna Silalahi, dan Romasdon Saragih merupakan aktor utama dalam menyampaikan pesan politik melalui baliho sebagai APK. Mereka secara sadar memanfaatkan baliho untuk membangun citra diri, menyampaikan visi-misi, serta menegaskan keseriusan mereka sebagai kandidat legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa para komunikator politik aktif dalam memanfaatkan media komunikasi yang tersedia untuk mencapai khalayak.

Dari hasil wawancara, para kandidat secara eksplisit menyatakan bahwa baliho merupakan “tombak utama pengenalan diri” di tengah masyarakat yang belum semuanya akrab dengan teknologi digital. Mereka tidak hanya hadir sebagai tokoh yang ingin dipilih, tetapi juga berperan sebagai penyampai nilai-nilai dan gagasan politik, menjadikan mereka aktor sentral dalam proses pendidikan politik masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa dalam realitas lokal seperti di Kecamatan Purba, aktor politik masih sangat berperan langsung dan personal dalam komunikasi politik.

3.1.2 Pesan Politik

Dalam konteks Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, baliho sebagai alat peraga kampanye memainkan peran strategis dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat pemilih. Menurut teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh Dan Nimmo, pesan politik merupakan inti dari proses komunikasi politik, karena di dalamnya terkandung informasi, nilai, dan gagasan yang disampaikan oleh aktor politik kepada khalayak dengan tujuan memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik. Dalam praktik kampanye, pesan politik menjadi medium utama bagi calon legislatif untuk membentuk citra diri, mengenalkan visi-misi, serta menunjukkan komitmen politik kepada publik. Di Kecamatan Purba, di mana struktur sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, kedekatan emosional, dan hubungan sosial yang kuat, baliho menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan politik secara visual, langsung, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pesan politik dalam baliho tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dirancang secara simbolik dan persuasif guna membangun keterikatan psikologis antara kandidat dan pemilih.

Fenomena ini terlihat jelas dalam strategi kampanye beberapa calon legislatif di Kecamatan Purba, yang menyadari pentingnya kesesuaian antara pesan kampanye dengan karakteristik budaya lokal. Salah satu calon terpilih dari Dapil Simalungun 1 yaitu bapak Drs. M. Chrismes Haloho menyampaikan dalam wawancara:

Kami memilih kata-kata yang singkat tapi bermakna, seperti ‘Dekat dengan Rakyat, Bekerja untuk Daerah’. Masyarakat di sini tidak terlalu peduli bahasa yang rumit. Yang penting mereka merasa didengar dan diperjuangkan.³²

Pesan semacam ini tidak hanya menekankan program kerja, tetapi juga menyiratkan kedekatan emosional dan representasi nilai kekeluargaan yang kuat di masyarakat Kecamatan Purba.

Sementara itu, dari sisi penerima pesan, warga juga menunjukkan bahwa pesan dalam baliho berdampak nyata terhadap persepsi politik mereka. Seorang warga Desa Purba Dolok, bapak Ismail Saragih menuturkan:

Saya lihat dari baliho, dia janji akan urus jalan. Itu yang kami butuhkan. Meskipun belum pernah jumpa langsung, saya merasa cocok karena apa yang dia tulis itu memang masalah kami sehari-hari.³³

Berdasarkan amatan peneliti terhadap pihak narasumber kandidat Pemilihan Legislatif Kabupaten Simalungun 2024 di Kecamatan Purba yaitu Drs. M. Crismes Haloho, Radisna Silalahi, dan Romasdon Saragih, dalam melakukan proses pemasaran politik sesuai dengan konsep pembentukan branding diri, masing-masing kandidat memiliki strategi dan pendekatan yang beragam. Ketiganya memperlihatkan pola branding yang berbeda-beda dalam menampilkan diri (*display*) di alat peraga kampanye (APK). M. Crismes Haloho dan Radisna Silalahi cenderung menampilkan

³² Wawancara bersama Drs. M. Crismes Haloho, anggota DPRD terpilih Kabupaten Simalungun, pada tanggal 10 Februari 2025.

³³ Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada tanggal 17 Februari 2025.

branding personal yang mengedepankan sosok dan citra pribadi mereka sendiri, tanpa terlalu banyak menonjolkan tokoh nasional atau partai secara dominan. Kedua kandidat memiliki pola yang hampir sama dalam menampilkan diri (*display*) di APK yaitu membranding dirinya sendiri tanpa melakukan penonjolan tokoh atau sosok orang lain yang memiliki pengaruh dan reputasi di masyarakat. Secara konsep kampanye, strategi pesan kampanye yang ditampilkan di APK yang dilakukan oleh kedua kandidat berpola pada pola *Candidate Oriented Campaigns*, dimana kandidat fokus dalam promosi kampanye dalam meraih kemenangan dalam pemilihan.

Partisipasi politik merupakan manifestasi dari keterlibatan warga negara dalam menentukan arah kebijakan publik dan pemimpin yang mewakili mereka, dan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Sejalan dengan pandangan, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari tindakan formal seperti memberikan suara dalam pemilu, hingga tindakan informal seperti diskusi politik dalam komunitas, serta partisipasi dalam kampanye dan gerakan politik.

Di wilayah seperti Kecamatan Purba, yang secara geografis terdiri dari desa-desa dengan keterbatasan akses informasi berbasis digital, alat peraga kampanye (APK) seperti baliho dan spanduk memainkan peran sentral sebagai jembatan komunikasi politik antara kandidat dengan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, APK menjadi media utama yang digunakan kandidat untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi, serta menampilkan citra politik yang ingin dibangun.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa keberadaan APK secara visual memicu kesadaran politik masyarakat, terutama karena pesan-pesan yang terpampang di tempat-tempat strategis menjadi bagian dari keseharian mereka. Seperti dikatakan oleh Ismail Saragih, salah satu warga Desa Purba Dolok.

Semakin banyak baliho yang saya lihat, semakin saya percaya bahwa calon itu serius dan memang sungguh-sungguh ingin dipilih.” Hal ini menunjukkan bahwa APK tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai indikator kesungguhan dan kredibilitas politik kandidat.³⁴

Pesan politik yang disampaikan melalui baliho tidak sekadar informasi biasa, melainkan konstruksi visual dan simbolik yang dirancang untuk membentuk persepsi, membangun kedekatan, serta mempengaruhi keputusan politik masyarakat. Dalam kampanye Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Purba, baliho berfungsi sebagai medium utama dalam menyampaikan pesan politik karena mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konatif dari khalayak dalam satu tampilan visual yang besar dan mencolok.



³⁴ Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada tanggal 17 Februari 2025.

Secara visual, baliho memuat foto kandidat yang dipilih secara cermat untuk memproyeksikan karakter tertentu misalnya, foto dengan senyum hangat, tatapan optimis, dan gestur tangan terbuka sering kali dimaksudkan untuk membangun kesan kehangatan, keterbukaan, dan kepemimpinan. Beberapa kandidat bahkan menambahkan elemen lokal seperti ulos, peci, atau simbol-simbol budaya Batak untuk menciptakan koneksi kultural dan etno-politis yang kuat dengan masyarakat Kecamatan Purba yang didominasi etnis Batak Simalungun.

Pesan politik yang disampaikan melalui baliho mencerminkan identitas kandidat, baik melalui penampilan visual seperti foto, warna partai, hingga slogan politik. Pesan yang ditampilkan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. Branding diri menjadi elemen penting dalam pesan politik yang dikemas secara visual untuk menarik simpati masyarakat. Beberapa kandidat juga memanfaatkan tokoh nasional sebagai bagian dari pesan untuk meningkatkan daya tarik, seperti menampilkan gambar Prabowo Subianto atau tokoh partai lainnya.

Sasaran dalam penggunaan alat peraga kampanye tentu yang utama adalah khalayak wajib pilih yang berdomisili di Kecamatan Purba. Di Kecamatan Purba, masih terdapat banyak wilayah yang minim akses terhadap internet dan media massa. Dalam konteks ini, baliho menjadi salah satu media visual yang dapat diakses secara mudah dan langsung oleh masyarakat.

3.1.3 Media Komunikasi Politik

Dalam dinamika Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, media komunikasi politik memainkan peranan penting sebagai saluran utama dalam penyampaian pesan kampanye kepada masyarakat. Secara teoritis, saluran komunikasi politik dapat berupa media atau alat (seperti organisasi, media massa, dan media digital), maupun berupa tindakan langsung (seperti memberikan suara, aksi protes, atau kampanye tatap muka). Dalam konteks lokal Kecamatan Purba, penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye menempati posisi dominan sebagai media komunikasi politik visual yang efektif, terutama karena keterbatasan akses terhadap media digital di sebagian besar wilayah. Berdasarkan data lapangan, mayoritas kandidat legislatif memilih untuk memaksimalkan baliho dan spanduk dibandingkan dengan media digital, videotron, atau umbul-umbul.

Saluran dalam konteks komunikasi politik dalam pemilu, dapat berupa media/alat, dan dapat pula berupa tindakan. Saluran berupa media/alat misalnya organisasi dan/atau institusi, sekolah, serta media massa dan/atau media baru. Sedangkan saluran berupa tindakan misalnya pemberian suara dalam pemilu, aksi mogok buruh atau pekerja yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja, serta aksi-aksi protes dan demokrasi lainnya. Pada era globalisasi ini, media baru dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak kepopuleran aktor beserta visi-misi kampanyenya. Para aktor semakin bergantung pada media baru sebagai arena sentral untuk melakukan komunikasi politik dengan seluruh penduduk, terutama karena fenomena melemahnya

pengaruh dan dukungan terhadap partai politik serta meningkatnya golongan independen dan pemilih “mengambang” (*floating voter*).

Dalam teori komunikasi politik, saluran komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk: media atau alat (seperti organisasi, lembaga pendidikan, media massa, serta media baru/digital) dan tindakan langsung (seperti memberikan suara, melakukan kampanye tatap muka, hingga aksi kolektif). Namun, dalam konteks lokal yang khas seperti Kecamatan Purba, yang sebagian wilayahnya masih mengalami keterbatasan akses terhadap media digital dan infrastruktur teknologi informasi, penggunaan media konvensional seperti baliho dan spanduk tetap menjadi instrumen utama dalam menyampaikan pesan politik. Alat peraga kampanye jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai media promosi visual, tetapi juga sebagai simbol kehadiran fisik kandidat di tengah-tengah masyarakat, menjembatani keterbatasan komunikasi langsung yang mungkin tidak tercapai secara merata oleh semua kandidat.

Data lapangan menunjukkan bahwa alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk merupakan media yang paling banyak digunakan oleh para calon legislatif di Kecamatan Purba, karena dianggap paling efektif dalam menjangkau masyarakat akar rumput. Hal ini ditegaskan oleh salah satu calon legislatif yang tidak berhasil meraih kursi, yaitu Ibu Radisna Silalahi yang menyatakan:

Saya sadar medsos itu penting, tapi untuk masyarakat desa, baliho lebih cepat dikenal. Waktu saya sosialisasi ke dusun-dusun, saya bawa spanduk biar orang tahu saya siapa. Itu lebih ngena daripada sekadar status Facebook.³⁵

Pandangan tersebut mencerminkan bahwa dalam konteks pemilih pedesaan, keberadaan visual fisik seperti baliho memiliki dimensi psikologis tersendiri: ia memberi kesan nyata, konkret, dan personal.

Hal ini disampaikan juga oleh salah seorang warga dari Urung Pane yaitu Ibu Sriani Malau yang mengatakan:

Saya tahu calon itu dari baliho yang dekat musholla. Tiap hari lewat situ. Jadi lama-lama hafal wajah, nama, dan partainya. Pas nyoblos, langsung ingat.³⁶

Baliho sebagai alat peraga kampanye berfungsi sebagai media komunikasi politik visual yang dominan di Kecamatan Purba. Penggunaan baliho masih menjadi strategi utama dalam menjangkau pemilih, khususnya di daerah yang akses terhadap media digital masih terbatas. Meskipun media sosial mulai digunakan oleh sebagian kecil kandidat, dominasi baliho masih terasa signifikan. Penempatan baliho di titik-titik strategis seperti dekat rumah ibadah, warung kopi, jalan utama, dan tempat berkumpulnya warga memperlihatkan bagaimana media ini masih dianggap efektif.

Berdasarkan data yang ditemukan, saluran dalam konteks komunikasi politik ini pada Pemilu Kecamatan Purba Tahun 2024, yang paling banyak digunakan adalah

³⁵ Wawancara Bersama ibu Radisna Silalahi, calon anggota legislatif Kabupaten Simalungun, pada tanggal 15 Februari 2025.

³⁶ Wawancara Bersama Sriani Malau, Masyarakat desa Urung Pane kecamatan Purba, pada tanggal 15 februari 2025.

berbentuk alat peraga kampanye, yakni berupa baliho dan spanduk, karena baliho dan spanduk ini merupakan yang paling efektif penggunaannya, di bandingkan dengan videotron, billboard dan umbul-umbul.

Karena baliho dan spanduk mudah di bawa kemanapun, seperti ketika paslon turun langsung sosialisasi ke masyarakat, untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat baik itu rupa wajah paslon atau pesan-pesan yang disampaikan melalui baliho dan spanduk tersebut, paslon selalu membawa salah satu alat peraga tersebut. Berbeda dengan billboard, ketika di jalan-jalan protokol atau jalan besar, paslon banyak yang menggunakan alat peraga ini. Karena pemakaian billboard sangat efektif digunakan di jalanjalan besar, mengingat pusat perhatian masyarakat umum akan terus menerus tertuju pada alat peraga ini.

3.1.4 Sasaran Atau Target Politik

Sasaran dalam pemilu, aktor bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya melalui komunikasi politik yang dilakukan dalam kegiatan kampanyenya. Untuk mengubah khalayak sasaran ke arah yang di inginkan, seorang aktor harus jeli memahami keadaan dan kecenderungan daerah dengan segala aspek ideologi, sejarah, maupun budaya yang melingkupi proses komunikasi politik dalam pilkada yang diikutinya, agar pesan yang disampaikan nya dapat diterima dengan baik.

Penentuan sasaran atau target politik menjadi aspek fundamental yang menentukan arah, isi, dan bentuk pesan kampanye. Target politik merujuk pada kelompok atau segmen masyarakat yang secara khusus ingin dijangkau oleh aktor politik, baik untuk membangun basis dukungan elektoral maupun memperluas jangkauan politik mereka. Dalam konteks Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan

Purba, Kabupaten Simalungun, sasaran politik dari para calon legislatif umumnya difokuskan pada masyarakat lapisan menengah ke bawah, pemilih pemula, serta komunitas-komunitas berbasis sosial-kultural seperti kelompok keagamaan dan organisasi adat. Karakteristik masyarakat Kecamatan Purba yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, hubungan sosial yang erat, serta memiliki kelekatan dengan tokoh informal menjadikan pendekatan personal dan kultural menjadi strategi utama dalam menjangkau target politik.

Pendekatan yang dilakukan pun bersifat kontekstual dan berlapis. Salah satu caleg terpilih dari Dapil Simalungun 1, Bapak Drs. M. Chrismen Haloho menjelaskan dalam wawancara:

Saya sengaja tidak hanya fokus di pusat kecamatan, tapi justru ke dusun yang jarang disambangi. Di sana, masyarakat masih menunggu siapa yang datang langsung, bukan siapa yang paling banyak di media. Saya juga prioritaskan anak muda, karena mereka bisa jadi agen kampanye di lingkungannya.³⁷

Strategi ini menunjukkan bahwa target politik bukan hanya dipahami secara jumlah suara, tetapi juga kekuatan sosial dan politik masyarakat, yakni seberapa besar pengaruh kelompok tersebut dalam menyebarkan pesan politik.

Caleg Radisna Silalahi yang tidak berhasil lolos juga mengakui bahwa kesalahan dalam menentukan target politik menjadi salah satu faktor kegagalannya:

Saya terlalu fokus di daerah basis lama, padahal situasi sudah berubah. Anak-anak muda sekarang yang paling aktif diskusi politik, tapi saya kurang menjangkau mereka.³⁸

³⁷ Wawancara bersama Drs. M. Chrismes Haloho, anggota DPRD terpilih Kabupaten Simalungun, pada tanggal 10 Februari 2025.

³⁸ Wawancara Bersama ibu Radisna Silalahi, calon anggota legislatif Kabupaten Simalungun, pada tanggal 15 Februari 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa segmentasi politik bersifat dinamis dan menuntut kandidat untuk adaptif terhadap perubahan perilaku dan pola komunikasi masyarakat.

Wawancara dengan warga juga memperkuat pentingnya kedekatan emosional dan pendekatan langsung dalam menjangkau target politik. Seorang ibu rumah tangga Dominta Purba masyarakat desa Bunga Sampang mengatakan:

Kami tidak lihat dari partainya siapa. Kalau orangnya pernah datang ke rumah ibadah, atau bantu acara kematian, itu yang kami pilih. Bukan sekadar janji di baliho.³⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Purba yang masih sangat kental dengan nilai-nilai sosial komunal, relasi personal menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan politik. Oleh karena itu, penentuan target politik tidak bisa hanya bersandar pada data statistik semata, melainkan harus mempertimbangkan jaringan sosial, struktur informal masyarakat, serta narasi lokal yang hidup dalam ruang sosial sehari-hari.

Masyarakat Kecamatan Purba sebagai khalayak politik menunjukkan respons yang beragam terhadap APK. Ada yang menjadikan baliho sebagai sumber informasi utama dalam mengenal kandidat, seperti pernyataan dari Dominta Siboro dan Srianai Malau. Namun, ada pula yang memiliki preferensi sendiri dan tidak menjadikan baliho sebagai penentu pilihan, seperti Ismail Saragih dan Ame Ovtasari Sumbayak. Keberagaman latar belakang masyarakat menyebabkan perbedaan dalam tingkat penerimaan terhadap APK.

³⁹ Wawancara Bersama ibu Dominta Siboro, masyarakat Bunga Sampang Kecamatan Purba, pada tanggal 18 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara di lapangan bersama masyarakat Kecamatan Purba disebutkan bahwa dengan adanya baliho yang terpasang di tempat-tempat yang sering dilewati atau dilalui oleh masyarakat, dapat memberikan informasi tentang para calon kandidat yang akan bersaing. Hal ini disampaikan juga oleh Srianai Malau yang merupakan warga Urung Pane.

Saya mengakui bahwa APK yang di jalan-jalan itu menjadi pilihan saya dalam pemilu kemarin. Selain karena saya tidak mempunyai pilihan (kandidat favorit), karena kemarin saya fokus pada pilihan Presiden serta saya tidak terlalu suka dunia politik.⁴⁰

Sasaran dalam penggunaan alat peraga kampanye tentu yang utama adalah khalayak wajib pilih yang berdomisili di Kecamatan Purba. Dalam penggunaan alat peraga kampanye di pemilu Kecamatan Purba tahun 2024 juga menyasar ke khalayak umum yang bukan saja berdomisili di Kecamatan Purba.

3.1.5 Pengaruh Atau Efek Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses tarik menarik berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan berbagai cara/teknik untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan aktor/komunikan. Komunikasi politik dengan menggunakan teknik persuasif berpeluang lebih besar dalam mempengaruhi khalayak sasarannya.

Efek komunikasi politik dari pemasangan baliho dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk: efek kognitif (meningkatkan pengetahuan), afektif (menumbuhkan

⁴⁰ Wawancara Bersama Srianai Malau, Masyarakat desa Urung Pane kecamatan Purba, pada tanggal 15 februari 2025.

ketertarikan atau simpati), dan behavioral (mempengaruhi keputusan memilih). Hasil wawancara menunjukkan bahwa baliho lebih banyak berpengaruh pada aspek kognitif dan afektif, yaitu masyarakat menjadi tahu dan merasa tertarik pada kandidat tertentu. Namun, pengaruh terhadap perilaku memilih masih bervariasi. Bagi pemilih rasional dan melek politik, baliho tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan.

Dari segi efek kognitif, baliho membantu meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau media digital secara merata. Melalui baliho, masyarakat dapat mengetahui nama, wajah, partai, nomor urut, hingga visi-misi kandidat. Bapak Ismail Saragih warga dari Nagori Purba Dolok mengungkapkan:

Saya pertama kali tahu nama dan wajah caleg itu dari baliho. Di situ juga tertulis dia mau perbaiki jalan desa. Jadi saya mulai ingat dan perhatikan. Awalnya saya tidak peduli soal politik.⁴¹

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana komunikasi visual yang konsisten dapat membangun pengetahuan politik dasar dan meningkatkan kesadaran warga terhadap proses elektoral. Efek ini sangat penting terutama di kalangan pemilih tradisional yang belum aktif mengakses media sosial atau portal berita digital.

Sementara itu, efek afektif tercermin dari bagaimana baliho mampu memunculkan simpati, rasa kedekatan, atau bahkan rasa percaya terhadap kandidat.

⁴¹ Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada tanggal 17 Februari 2025.

Desain baliho yang menampilkan kandidat dengan senyum ramah, menggunakan pakaian adat, serta latar belakang budaya lokal seperti sawah, gereja, atau rumah adat, memiliki daya simbolik yang kuat. Ibu Dominta Siboro warga Bunga Sampang menyampaikan:

Saya suka baliho yang fotonya pakai ulos dan latar rumah Batak. Rasanya lebih merakyat, seperti bukan orang jauh.

Efek afektif ini penting dalam konteks masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai emosional, kekeluargaan, dan kedekatan personal, karena membentuk ikatan simbolik antara pemilih dan calon legislatif. Komunikasi visual melalui baliho memungkinkan kandidat menanamkan pesan implisit tentang kesamaan identitas, empati, dan kepedulian sosial.

Adapun dari sisi efek behavioral, baliho juga terbukti mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan politik, seperti menentukan pilihan pada hari pemungutan suara. Beberapa warga mengakui bahwa meskipun tidak mengikuti kegiatan kampanye atau dialog tatap muka, mereka merasa cukup ‘terwakili’ melalui pesan dan visual yang disampaikan dalam baliho. Seorang pemilih pemula Ame Ovtasari Sumbayak mengatakan:

Saya belum pernah ikut kampanye karena kerja. Tapi saya lihat baliho itu tiap hari, dan pesannya bagus. Akhirnya saya pilih dia karena kayaknya serius.⁴²

⁴² Wawancara Bersama Ame Ovtasari Sumbayak, masyarakat Huta Raja Kecamatan Purba sebagai pemilih prmula, pada tanggal 15 februari 2025.

Ini menegaskan bahwa baliho tidak hanya menjadi alat pengenalan semata, tetapi memiliki fungsi persuasif yang mampu mengarahkan sikap politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih yang pasif atau tidak memiliki preferensi politik yang kuat sebelumnya (*floating voters*).

Beberapa informan menyatakan bahwa baliho merupakan media kampanye yang paling mudah diakses, terutama oleh masyarakat pedesaan dan lansia yang tidak aktif di media sosial. Seorang informan dari nagori Purba Dolok mengatakan:

Saya tidak punya HP pintar, jadi saya tahunya calon-calon itu dari baliho yang dipasang di dekat gereja dan di jalan besar. Wajahnya jadi familiar, saya jadi tahu siapa orangnya.⁴³

Dalam penggunaan alat peraga kampanye sangat efektif sebagai media luar ruang untuk menyampaikan pesan komunikasi politik. alat peraga kampanye ini hanya berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait apa saja penyampaian pesan yang ada di dalamnya dan kemudian juga sangat efektif untuk pengenalan diri terhadap paslon tersebut. Terlepas dari siapa yang mau di pilih oleh masyarakat, tergantung pendekatan-pendekatan yang di lakukan oleh paslon dan timses paslon tersebut. terbukti pada gelaran pilkada Kecamatan Purba tahun 2024, alat peraga kampanye mampu meningkatkan partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan pemilu Kecamatan Purba sebelumnya.

⁴³ Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada tanggal 17 Februari 2025.

Teori komunikasi politik Dan Nimmo terbukti relevan dalam menjelaskan praktik kampanye di Kecamatan Purba. Kelima unsur teori tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan proses komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat. Lima unsur utama dalam teori tersebut yakni komunikator politik (calon legislatif), pesan politik (visi, misi, dan simbol partai), media komunikasi politik (baliho sebagai sarana visual), khalayak politik (masyarakat pemilih), serta efek komunikasi politik (perubahan persepsi dan peningkatan partisipasi) muncul secara nyata dan saling berinteraksi dalam proses komunikasi politik di lapangan. Baliho, dalam konteks ini, bukan sekadar alat promosi visual, tetapi menjadi medium strategis yang memungkinkan penyampaian pesan politik secara masif, berulang, dan terstruktur kepada masyarakat luas, terutama di wilayah yang secara geografis dan teknologis masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap media digital. Baliho sebagai APK menjadi instrumen penting dalam proses ini karena mampu menyampaikan pesan secara luas dan berulang kepada masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, juga dikenal memiliki keanekaragaman sosial dan budaya yang cukup kompleks. Berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan tradisi turut membentuk pengalaman, pandangan, serta sikap politik masyarakat di wilayah ini. Keberagaman tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi cara masyarakat dalam menerima dan menilai informasi politik, khususnya dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Simalungun tahun 2024. Alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul menjadi media penting

dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Apakah dengan banyaknya penempatan baliho sebagai APK menjadi sumber informasi utama dalam mengenal sosok kandidat yang maju dalam pemilihan, atau bahkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih sosok kandidat yang ditampilkan di APK di sekitarnya tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap lima responden yang tinggal dan memilih di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, semua responden sepakat bahwa APK memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan politik mereka dalam pemilihan tersebut. Melalui spanduk, baliho yang ditempatkan di tempat umum, responden memperoleh informasi mengenai kandidat atau caleg. Namun, untuk preferensi pilihan kandidat, keberadaan APK tidak selalu mempengaruhi masyarakat dalam memilih Caleg yang banyak menempatkan dan memproduksi alat peraga di tempat umum.

Hal ini sesuai pernyataan Ismail Saragih yang merupakan warga Purba Dolok, mengakui APK menjadi alat bagi dirinya untuk informasi mengenai kandidat yang maju dalam Pileg Kecamatan Purba 2024, namun untuk calon yang akan dipilih beliau menyatakan memiliki pilihan sendiri.

Ya, saya juga mengetahui berbagai kandidat yang maju di Pileg itu dari APK, selain dari tempat lain seperti koran, internet, dan-lain lain lah. Nah, untuk calon favorit kebetulan saya punya pilihan sendiri.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada tanggal 17 Februari 2025.

Di sisi lain, ternyata penempatan APK dapat menjadikan suatu preferensi dalam memilih. Dominta Siboro yang merupakan masyarakat Bunga Sampang, menyatakan bahwa dirinya menjadikan APK sebagai preferensi memilih dalam memberikan suara. Pilihannya jatuh pada kandidat yang banyak menempatkan APK di tempat umum, hal ini dikarenakan beliau tidak terlalu memikirkan kandidat di pemilihan karena kesibukannya dalam aktivitas sehari-hari seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

Saya tidak mau ambil pusing mengenai kandidat itu, karena saya sehari-sehari sibuk kerja ini itu, maka dengan adanya APK itulah menjadi pedoman saya dalam mengetahui calon-calon yang maju. Waktu kemarin itu sih saya pilih kandidat yang banyak ada APK, karena itu tadi, saya sibuk lagipula kan masa Caleg tidak ada APK itu kita pilih, tidak bagus dilihat, harus semarak.⁴⁵

Hal tersebut juga disetujui oleh Srianai Malau yang merupakan warga Urung Pane, dalam wawancara dengannya mengatakan bahwa kehadiran APK tidak hanya sebagai media informasi kandidat yang maju dalam kontestasi politik, tetapi juga menjadi preferensi dirinya dalam memilih.

Saya mengakui bahwa APK yang dijalan-jalan itu menjadi pilihan saya dalam pemilu kemarin. Selain karena saya tidak mempunyai pilihan (kandidat favorit), karena kemarin saya fokus pada pilihan Presiden serta saya tidak terlalu suka dunia politik.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara Bersama ibu Dominta Siboro, masyarakat Bunga Sampang Kecamatan Purba, pada tanggal 18 Februari 2025.

⁴⁶ Wawancara Bersama Srianai Malau, Masyarakat desa Urung Pane kecamatan Purba, pada tanggal 15 februari 2025.

Namun, Pemanfaatan APK oleh para kandidat juga tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat sebagai pemilih. Ame Ovtasari Sumbayak, yang merupakan representasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 ini menyatakan keberadaan APK di berbagai fasilitas publik memang menjadi sumber informasi mengenai kandidat, namun dirinya lebih menyukai sumber informasi kondisi Pemilu 2024 dari internet seperti media sosial. Gadis yang tinggal di desa Tiga Runggu, Kecamatan Purba mengatakan bahwa penggunaan APK di masa kini cenderung merusak tatanan dan kebersihan kota, dengan banyaknya penempatan yang tidak teratur. Lanjutnya, dengan perkembangan teknologi, seharusnya promosi kampanye di internet dengan memanfaatkan berbagai media sosial dapat menjadi alternatif karena mudah diakses oleh segala lapisan masyarakat dan ramah lingkungan.

Meskipun baliho merupakan alat peraga kampanye yang dominan secara visual, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan baliho dalam menentukan pilihan politik mereka. Ada beberapa faktor masyarakat dalam memilih yaitu pengaruh tokoh masyarakat dan agama rekomendasi dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kepala desa juga menjadi faktor penting dalam pembentukan preferensi politik. Caleg yang mendapatkan dukungan dari tokoh berpengaruh sering kali lebih dipercaya oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Rita Berlina Purba dalam wawancaranya:

Pada saat menjelang pemilu kemarin kepala desa datang dan memberikan rekomendasi kandidat caleg yang harus atau perlu dipilih, ya saya sebagai

warga tidak telan mentah-mentah apa yang di sampaikan oleh kepala desa tersebut , tetapi saya pilih-pilih dulu Caleg itu bagus untuk dipilih atau tidak.⁴⁷

Uang atau Politik Uang (*Money Politics*) meskipun tidak diungkapkan secara terbuka, beberapa responden secara tersirat menyebutkan bahwa pemberian uang, sembako, atau fasilitas lainnya bisa menjadi pertimbangan saat memilih. Fenomena ini masih menjadi bagian dari realitas politik elektoral di daerah.

Hal ini disampaikan juga oleh Ame Ovtasari Sumbayak dalam wawancaranya:

Ya memang masih sangat banyak caleg atau tim suksesnya yang datang kerumah-rumah untuk memberi uang atau barang, tapi tidak semua orang langsung pilih karena itu. Banyak juga yang mikir panjang, mau pilih siapa yang benar-benar bisa dipercaya.⁴⁸

Uraian di atas memberikan berbagai pengetahuan bagaimana penilaian masyarakat mengenai APK dalam proses kampanye kandidat serta pengaruhnya dalam proses pemilihan umum. Promosi APK menjadi sumber informasi masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan kandidat yang maju dalam pemilihan serta terkadang ikut menjadi ujung tombak kandidat dalam meyakinkan pemilih. Namun, penggunaan APK oleh kandidat bukan faktor penentu dalam pemberian hak suara oleh masyarakat. Dengan segala pandangan serta tingkat ‘melek politik’ yang dimiliki, sikap kritis terhadap hak politik menjadi lebih tinggi membuat tiap individu mempunyai perbedaan pertimbangan tersendiri dalam memilih sosok pemimpin.

⁴⁷ Wawancara Bersama Rita Berlina Purba, salah satu masyarakat Kecamatan Purba, Pada tanggal 18 februari 2025.

⁴⁸ Wawancara Bersama Ame Ovtasari Sumbayak, masyarakat Huta Raja Kecamatan Purba sebagai pemilih pertama, pada tanggal 15 februari 2025.

Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Purba pada Pemilu Legislatif 2024 tercatat berada pada kisaran 75% hingga 82%⁴⁹, angka yang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki akses digital lebih baik namun justru menunjukkan apatisisme politik yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa intensitas komunikasi politik melalui APK berhasil mengaktifkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih, terutama di komunitas dengan budaya tatap muka yang masih kuat.

Tabel 3.1 Partisipasi Pemilih Tahun 2019 dan 2024 di Kecamatan Purba

No	Nama Desa	Data Partisipasi 2019	Data Partisipasi 2024
1	Purba Tengah	713	855
2	Pematang Purba	1.137	1.620
3	Urung Purba	991	1.147
4	Purba Sipinggian	1.102	1.254
5	Hinalang	1.167	1.586
6	Purba Dolok	606	702
7	Tano Tinggir	427	603
8	Tiga Runggu	1.884	3.020
9	Saribu Jandi	636	817
10	Huta Raja	503	538
11	Bandar Sauhur	376	474
12	Bunga Sampang	264	364
13	Nagori Tengah	574	634
14	Urung Pane	899	1.025
	Total	11.279	14.639

KPU Kab. Simalungun

Peningkatan angka partisipasi pemilih sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 menunjukkan tren positif dalam keterlibatan politik masyarakat Kecamatan Purba dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Lonjakan suara hampir merata di seluruh nagori/desa, dengan peningkatan tertinggi terlihat di Desa Tiga Runggu yang mengalami kenaikan

⁴⁹ KPU Kabupaten Simalungun

sebesar 1.136 pemilih. Kenaikan ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif alat peraga kampanye (APK) seperti baliho dan spanduk, yang secara masif digunakan oleh para calon legislatif untuk membangun visibilitas, menyampaikan pesan politik, serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat pemilih. Di tengah keterbatasan akses terhadap media digital, keberadaan baliho yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti pasar, jalan lintas desa, rumah ibadah, dan pusat kegiatan sosial berhasil menjembatani keterbatasan informasi politik dan menciptakan hubungan emosional antara kandidat dan konstituen. Wawancara dengan sejumlah warga juga mengindikasikan bahwa baliho menjadi salah satu sumber utama dalam mengenali kandidat dan memahami program kerja mereka. Dengan demikian, data partisipasi ini mempertegas bahwa komunikasi politik yang dilakukan secara kontekstual dan visual melalui APK dapat berdampak nyata terhadap peningkatan partisipasi elektoral, khususnya di wilayah pedesaan dengan budaya tatap muka yang masih kuat dan kohesi sosial yang tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alat peraga kampanye (APK), khususnya baliho, tetap menjadi instrumen strategis dan efektif dalam proses kampanye politik di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Purba pada Pemilu Legislatif 2024. APK berperan penting sebagai media komunikasi politik visual yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung, terutama wilayah desa yang belum terakses media digital dan internet secara merata. Fungsi APK tidak hanya sebatas promosi visual, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik, pembentukan opini publik, serta mempengaruhi perilaku pemilih.

Namun demikian, keberadaan baliho dan APK lainnya di ruang publik menjadi indikator keseriusan kandidat dalam mengikuti pemilihan, sekaligus membangun objek visual yang konsisten di benak masyarakat. Strategi pemasangan APK melibatkan pemetaan sosial, pemanfaatan relasi, penempatan di lokasi strategis, serta penentuan branding diri yang tepat sesuai karakteristik pemilih setempat. Meskipun biaya produksi dan distribusi APK cukup tinggi, efektivitasnya dalam membangun citra kandidat dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat tetap diakui oleh para kandidat, baik yang menang maupun yang kalah. Selain itu, dalam konteks masyarakat yang masih mengedepankan nilai kearifan lokal dan interaksi tatap muka, APK menjadi

media utama dalam memperkenalkan kandidat. Sementara media sosial mulai digunakan, penetrasinya masih terbatas dan belum mampu menggantikan peran APK secara signifikan di daerah seperti Kecamatan Purba. Dengan demikian, APK, khususnya baliho, tetap menjadi ujung tombak strategi kampanye legislatif, berperan vital dalam memperkuat branding kandidat, membangun komunikasi politik, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

Berdasarkan pendekatan teori komunikasi politik dan temuan lapangan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Purba, dapat disimpulkan bahwa baliho sebagai alat peraga kampanye (APK) masih menjadi media komunikasi politik yang sangat efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses digital. Baliho berperan penting sebagai sarana visualisasi politik yang mudah diakses masyarakat, berfungsi sebagai media informasi, pencitraan, dan komunikasi simbolik yang membangun kedekatan antara kandidat dengan pemilih. Penggunaan baliho oleh para calon legislatif menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya membangun citra diri dan menyampaikan pesan politik secara langsung kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan melalui baliho tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan dikemas secara visual untuk membentuk persepsi serta simpati masyarakat. Penempatan baliho di titik-titik strategis memperkuat efektivitasnya sebagai media komunikasi politik utama di Kecamatan Purba.

Efek komunikasi politik dari baliho terutama terlihat pada peningkatan pengetahuan dan ketertarikan masyarakat terhadap kandidat. Namun, pengaruh baliho

terhadap perilaku memilih (efek behavioral) masih bervariasi, tergantung pada tingkat rasionalitas dan literasi politik pemilih. Secara keseluruhan, baliho terbukti mampu meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat proses pendidikan politik di masyarakat, menjadikan teori komunikasi politik Dan Nimmo relevan dalam menjelaskan praktik kampanye di daerah ini.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian tentang baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif, berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

Diharapkan agar KPU dan Bawaslu, sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, memperkuat pengawasan serta implementasi regulasi terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, khususnya baliho, agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, pengawasan juga harus mempertimbangkan aspek estetika kota dan dampak lingkungan, karena pemasangan yang semrawut atau sembarangan dapat merusak tata ruang, mengganggu pandangan lalu lintas, dan mencemari visual publik. Sosialisasi terhadap aturan kampanye harus ditingkatkan secara aktif dan berkelanjutan kepada

para kandidat dan tim suksesnya agar mereka memahami konsekuensi hukum dan etika dari setiap tindakan kampanye, termasuk pemasangan APK.

2. Kepada para kandidat dan partai politik:

Disarankan agar para calon legislatif dan partai politik tidak hanya mengandalkan baliho sebagai media kampanye utama, tetapi menggabungkannya dengan strategi komunikasi politik yang lebih partisipatif dan adaptif, seperti kunjungan langsung ke masyarakat (door to door), forum dialogis, diskusi kelompok kecil, dan kegiatan sosial berbasis komunitas. Di sisi lain, dalam menghadapi era digital yang semakin dominan, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp Group perlu dimaksimalkan untuk menjangkau pemilih muda dan pengguna internet aktif. Sinergi antara media tradisional dan digital akan meningkatkan jangkauan, kredibilitas, dan fleksibilitas kampanye politik, sehingga pesan politik tidak hanya tersampaikan luas, tetapi juga dipahami dan diterima secara lebih mendalam.

3. Kepada masyarakat Kecamatan Purba:

Diharapkan agar masyarakat Kecamatan Purba dapat menjadi pemilih yang aktif, cerdas, dan kritis dalam menerima dan menyaring berbagai informasi politik yang diterima, khususnya dari alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster. Masyarakat perlu membudayakan kebiasaan untuk tidak langsung menerima informasi secara mentah, tetapi melakukan verifikasi terhadap latar belakang kandidat, integritas pribadi, dan rekam jejak kinerja sebelumnya jika pernah menjabat.

4. Penelitian Lebih Lanjut:

Studi mendalam tentang baliho dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu terus dikembangkan untuk memahami tantangan serta peluang yang ada, termasuk strategi lainnya terhadap partisipasi memilih masyarakat Kecamatan Purba. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih rasional dalam memilih calon kandidat legislatif, serta berkontribusi dalam pemilihan umum di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Maret 2004).

Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Amalia, Ratna, Rahadi dan Definitif, *Komunikasi Politik Pemerintahan*, Malang, 2024.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2008.

Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Canel, M. J., & Voltmer, K. (2014). *Comparing Political Communication across Time and Space: New Studies in an Emerging Field*. Palgrave Macmillan.

Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman, pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

Dan Nimmo. 2005. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: RemajaRosdakarya.

Effendy, Onong U, 2005. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Entman, R. M. (2004). *Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy*. University of Chicago Press.
- Firmanzah, Marketing Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Haroen, Dewi. Personal Branding. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- J. Moleong, Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga, 2014.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. SAGE Publications.
- McNair, B. (2011). *An Introduction to Political Communication* (5th ed.). London: Routledge.
- McQuail, Denis. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Nimmo, D. (2001). *Political Communication and Public Opinion in America*. Greenwood Publishing.
- Nimmo, Dan. *The Political Persuaders: The Techniques of Modern Election Campaigns*. New Jersey: Prentice Hall, 1999.
- Prihatmoko, joko. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang 2003).
- Putra, Fajar Setyaning Dwi, dkk. *Marketing Politik: Teori dan Konsep*. Jakarta: Widina, 2014.
- Ramlan Surbakti. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.
- Siregar, Donny. *Politik Uang dalam Pemilu Legislatif di Indonesia*. Medan: Pustaka Simalungun, 2021.

Solatun D. Sayuti, Dr., Drs., M.Sc. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung: Alfabeta, 2010.

Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Sutisna, Nandang. *Digital Marketing for Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Jakarta: Adab, 2020.

- **Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Aditya, R., & Pramudya, A. (2020). Kebijakan Pemasangan Baliho Kampanye dan Dampaknya terhadap Tata Ruang Kota: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah*, 5(1), 45-56.

Arief, B. (2020). "Evaluasi Dampak Lingkungan dari Penggunaan Media Kampanye Baliho: Perspektif Kebijakan Lingkungan." *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 7(2), 78-91.

Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.

Hakim, Lukmanul. (2021). "Pengaruh Penempatan Baliho Kampanye Terhadap Citra Calon Pemimpin pada Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 5(2), hlm. 123-136.

Hilmi. (2014). Analisis Siomatika pada Poster Kampanye Partai Politik Islam: Studi Kasus Calon Legislatif 2014 dari PPP, PKB, PAN, PKS di Kota Semarang

Hudi, Moh. *Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Sleman (Analisis terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2014 Juncto Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 Juncto Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2013 tentang*

Pemasangan Alat Peraga Kampanye). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Michelle, G. F., Sabrina, N. A., Dermawan, K. J., Septivares, M. B., & Yurisna, A. (2024). *Evaluasi penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam perspektif sila kedua Pancasila*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 25–40.

Priana, A. & Wijayanti, V. (2020) Efektivitas Iklan Baliho Grace Natalie Dalam Meningkatkan Citra Diri Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Tahun 2019. Jurnal Komunikasi dan Media Vol 4. No. 2 Februari 2020

Priana, A. (2020). *Efektivitas Iklan Baliho Grace Natalie dalam Meningkatkan Citra Diri sebagai Ketua Umum PSI*. Commed: Jurnal Komunikasi dan Media, 49.

Purnengsih, I. (2017). Makna dan Pesan dalam Baliho Pemilu Legislatif 2014. Jurnal Desain, 4(03), 231. <https://doi.org/10.30998/jurnal desain.v 4i03.1604>

Suryo, H. & Aji, H. K. (2019). *Komunikasi Politik Pasangan Calon PDIP pada Alat Peraga Kampanye Baliho pada Pilkada 2015 di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta*. Research Fair Unisri, 105.

Tempo. (2019). Peraturan Kampanye Pemilu: Cara Pemasangan Baliho dan Spanduk yang Sesuai Aturan . Diakses dari <https://tempo.co>

Yulandari, R., & Abidin, Z. (2014). Pengaruh Iklan Politik Baliho sebagai Bagian dari Strategi Kampanye T. Irwan Djohan pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014 . Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Laporan Survei Politik dan Partisipasi Pemilih*. Jakarta: LSI, 2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Mengatur kampanye Pemilu 2024, termasuk waktu, bentuk kampanye, larangan, dan pemasangan APK.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kampanye.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2017.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

- **Internet**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. (2024). *Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Semester I Tahun 2024*. Diakses dari <https://simalungunkab.bps.go.id/> pada 17 Mei 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. (2024). Kabupaten Simalungun dalam Angka 2024. Diakses pada 25 Mei 2025 dari <https://simalungunkab.bps.go.id/>.

Kodepos Simalungun, Daftar Wilayah dan Kode Pos desa kelurahan di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Terbaru Tahun 2024. diakses pada 23 September 2024, <https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/purba-342723>

Lampiran



Dokumentasi bersama Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Simalungun



Dokumentasi bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun



Dokumentasi Bersama Anggota DPRD Terpilih



Dokumentasi bersama Calon Anggota DPRD



Dokumentasi bersama Masyarakat Huta Raja



Dokumentasi bersama Masyarakat Bunga Sampang



Dokumentasi bersama Masyarakat Purba Dolok



Dokumentasi bersama Masyarakat Tanoh Tinggi



Dokumentasi bersama Masyarakat Urung Pane

Transkrip Wawancara

- **Calon Anggota Legislatif Yang Menang**

1. Menurut anda, sejauh mana pengaruh baliho dalam meningkatkan efektifitas politik masyarakat?
2. Selain menggunakan baliho, strategi kampanye apa yang anda gunakan?
3. Apa strategi utama Anda dalam kampanye Pemilu 2024, dan sejauh mana peran baliho dalam strategi tersebut?
4. Apakah Anda berencana untuk terus menggunakan baliho sebagai media komunikasi politik di masa mendatang? Mengapa?
5. Dalam pemasangan baliho yang dilakukan oleh timses apakah ada arahan ke suatu tempat? Dan mulai kapan sih baliho tersebut mulai dipasang?
6. Pada saat masa tenang apa yang dilakukan oleh caleg dan timsesnya terhadap baliho, apakah dibuka atau tetap terpasang?
7. Paska pemilu apa yang dilakukan terhadap baliho yang telah dipasang?

- **Calon Anggota Legistaif Yang Kalah**

1. Menurut Anda, apakah baliho memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas calon legislatif?
2. Menurut Anda, apakah faktor kekalahan Anda lebih disebabkan oleh kurangnya eksplor kampanye, termasuk melalui baliho, atau faktor lain seperti program kampanye?
3. Apa saja strategi kampanye yang Anda gunakan dalam Pemilu 2024, dan bagaimana peran baliho dalam strategi tersebut?
4. Menurut Anda, apakah jumlah, desain, atau lokasi pemasangan baliho memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu?
5. Dalam pemasangan baliho yang dilakukan oleh timses apakah ada arahan ke suatu tempat? Dan mulai kapan sih baliho tersebut mulai dipasang?
6. Pada saat masa tenang apa yang dilakukan oleh caleg dan timsesnya terhadap baliho, apakah dibuka atau tetap terpasang?
7. Paska pemilu apa yang dilakukan terhadap baliho yang telah dipasang?

- **KPU**

1. Bagaimana regulasi KPU terkait penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam Pemilu 2024?
2. Seberapa besar peran KPU dalam mengatur jumlah, ukuran, dan lokasi pemasangan baliho di Kecamatan Purba?

3. Apakah ada batasan tertentu yang ditetapkan KPU bagi calon legislatif dalam penggunaan baliho?
4. Bagaimana KPU melihat efektivitas baliho dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih?
5. Apakah KPU melaksanakan sosialisasi tentang pemasangan alat peraga kampanye kepada caleg? Apakah jika melanggar akan dikenakan sanksi?

- **Untuk Warga Masyarakat (Pemilih)**

1. Dari mana Anda pertama kali mengetahui tentang calon legislatif di daerah Anda?
2. Apakah Anda pernah melihat baliho calon legislatif selama masa kampanye? Di mana biasanya Anda melihatnya?
3. Apakah isi atau desain baliho berpengaruh terhadap keputusan Anda untuk memilih? Mengapa?
4. Apakah menurut Anda baliho membantu mengenal calon dan program kerjanya?
5. Apakah baliho membuat Anda merasa lebih dekat atau akrab dengan sosok calon tertentu?
6. Sejauh mana baliho memengaruhi keputusan Anda dalam memilih di Pemilu 2024?
7. Menurut Anda, apakah baliho lebih efektif daripada media sosial atau kampanye langsung?
8. Apakah Anda ikut memilih pada Pemilu 2024? Jika ya, apakah baliho turut memengaruhi keputusan tersebut?
9. Selain baliho anda memilih caleg dikarenakan apa?

Rekapitulasi DPT di Kabupaten Simalungun



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Pamatang Raya, 21 Juni 2023

Nomor : 400/PL.02-SD/1208/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampalan BA dan SK Penetapan DPT

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara

di-

Medan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU Kabupaten Simalungun untuk Pemilihan umum Tahun 2024, maka bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Simalungun dan Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian dokumen ini disampaikan kepada Bapak dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun


Raja Ahab Damanik

tembusan:

1. Yth. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Peringgal



KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

BERITA ACARA

Nomor : 340 /PL.01.2-BA/1208/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN SIMALUNGUN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Niagara Parapat Jl. Pembangunan No. 1 Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Simalungun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SIMALUNGUN					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
32	413	3052	368139	375132	743271

2. Menerima masukan data dari:

Bawaslu Kabupaten Simalungun;

1. Terdapat Ganda Antar Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo yang belum ditindaklanjuti oleh PPK yaitu: Almina Sinulingga NIK 1206014107920108 di Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya TPS 10, kemudian sudah ditindaklanjuti di TMS kan di Kabupaten Simalungun;
2. Terdapat Ganda Internal di Kecamatan Raya, yang belum ditindaklanjuti oleh PPK yaitu:
 - 2.1. Eva Darlince Purba Nik.1272076001820001 di Silou Huluan ganda dalam TPS 3 dan salah satunya telah di TMS kan;
 - 2.2. Lesmarida Sidabalok Nik.1208295011690008 di Merek Raya ganda dalam TPS 2 dan salah satunya telah di TMS kan;

- 2.3. Walpinus Gea Nik.1208291512740002 di Dalig Raya TPS 4 dan 7 dan tindaklanjuti di TMS kan di TPS 7;
- 2.4. Salde Sinaga Nik. 1208294311550002) di Dalig Raya TPS 6 dan 7 dan tindaklanjuti di TMS kan di TPS 7
3. Di Kecamatan Ujung Padang terdapat Pemilih Atas Nama Nanta Pratama dengan NIK 1209302508060002 sebelumnya terdaftar di DPT online atas nama Dika Agus Tami di TPS 9 Tanah Rakyat Pulo Bandring Kabupaten Asahan, telah ditindaklanjuti Nanta Pratama sebagai pemilih baru di Nagori Sayur Matinggi TPS 3 Kecamatan Ujung Padang.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun.

Dibuat di : Parapat
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

KPU Kabupaten Simalungun

1. RAJA AHAB DAMANIK

KETUA



2. PUJI RAHMAD HARAHAHAP

ANGGOTA

2.

3. SALMAN ABROR

ANGGOTA

3.

4. FATIMAH YANTI SINAGA

ANGGOTA

4.

5. RAHMADHANI SARI
DAMANIK

ISNI ANGGOTA

5.

5.



PROVINSI
KABUPATEN

SUMATERA UTARA
SIMALUNGUN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Modul A-Retap Katko

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Sundar	17	221	27553	27406	54959
2	Gunung Mulus	16	120	15571	15001	31252
3	Gunung Muligas	9	100	13168	12066	25034
4	Panne	17	90	8895	10649	20544
5	Panombuan Pane	11	75	8190	5066	13954
6	Jodang Helaran	13	58	6950	7244	14194
7	Paya Kahayan	14	68	7081	7320	14411
8	Boger Muligas	17	127	15320	15528	30848
9	Sidamahi	15	114	11459	12235	23694
10	Pematang Sidamahi	10	65	7279	7515	14794
11	Tanah Jawa	20	161	21000	21669	42669
12	Helondjari	8	77	9454	9755	19249
13	Dolok Panbuan	15	72	8505	8866	17371
14	Pudja	14	90	10104	10118	20222
15	Hutanjari Horgan	5	22	2474	2548	5022
16	Gangsa Siganjan Bidon	6	54	6458	6872	13330
17	Dolok Ribu Mangar	16	131	17038	17185	34223
18	Huta Nany Raja	16	107	12941	13714	26655
19	Jaya Maraja Bih Janti	8	68	8851	9259	18210
20	Dolok Pardamean	11	52	5206	5366	10662
21	Pematang Bandar	13	112	14774	14696	29760
22	Bandar Hulan	10	94	10932	11003	21935
23	Bandar	16	230	30683	30925	61608

24	Bandar Masalam	10	90	10875	11136	22111
25	Sinamarta	7	55	6379	6650	13029
26	Dolak Sibu	14	62	6560	6854	13444
27	Sibau Kihnan	16	66	6956	7193	14149
28	Taman Dolak	11	129	16941	16857	33508
29	Raya	17	106	12050	12141	24231
30	Uluong Padang	20	152	16499	16620	33119
31	Pematang Sima Hura	10	41	4921	5023	9944
32	Dolog Masapal	10	42	4654	4702	9356
TOTAL		413	3052	368139	375132	743271

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun di Parapat Tanggal 21 Juni 2023

KPU KABUPATEN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

Raja Arab Damanik

2. Anggota

Puji Rahmad Harsip

3. Anggota

Salman Abur

4. Anggota

Fatimah Yanti Sinaga

5. Anggota

Rahmadhani Sari Isri Damanik





PROVINSI
KABUPATEN

: SUMATERA UTARA
: SIMALUNGUN

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Model A: Rekap Kasiko Perubahan Pemilih

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih Asli	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbedaan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	Samar	17	221	64856	126	643	226	1087
2	Gunung Malesu	16	120	31252	101	207	826	752
3	Gunung Maligas	9	100	26034	46	145	350	309
4	Parai	17	80	20544	67	1737	387	599
5	Panomorian Parel	11	75	16564	65	558	795	373
6	Julang Hasran	13	56	14194	117	460	364	330
7	Raya Karan	14	60	14411	241	379	120	613
8	Boay Maligas	17	127	30848	171	1256	895	667
9	Sidamanik	15	114	23694	74	264	331	595
10	Pematang Sidamanik	10	65	14794	35	271	112	401
11	Tanah Jawa	20	161	42699	135	238	347	723
12	Hasnuddin	9	77	19246	26	381	57	454
13	Dolok Pembuan	15	72	17371	267	756	996	196
14	Puha	14	90	20222	68	113	34	301
15	Haranggal Honten	5	22	5022	4	44	335	30
16	Grang Sipangan Bilon	6	54	13330	57	553	986	210
17	Dolok Batu Nanggar	16	131	34223	85	205	160	262
18	Huta Bayu Raja	16	107	26655	86	282	277	412
19	Jawa Marja Ban Jambu	8	66	16210	42	110	31	92

20	Dolok Pardamean	15	52	10652	177	328	248	278
21	Pematang Bandar	15	112	29760	50	308	95	480
22	Bandar Hujan	10	94	21685	38	222	60	648
23	Bandar	16	230	61608	458	802	1756	481
24	Bandar Masiam	10	90	22111	25	235	293	284
25	Silinkusa	7	55	13029	18	361	5	320
26	Dolok Sibau	14	62	13444	18	317	88	180
27	Silau Kahnan	16	66	14149	42	246	183	333
28	Tapan Dolok	15	129	33698	40	400	1822	519
29	Raya	17	108	24231	68	282	91	187
30	Ujung Padang	20	152	33119	179	667	397	458
31	Pematang Sima Huta	10	41	9544	103	371	698	97
32	Dolok Masagal	10	42	9556	111	147	34	67
TOTAL		413	3052	743271	3180	13192	13749	12790

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun di Paripat Tanggal 21 Juni 2023

KPU KABUPATEN

Nama

1. Ketua

Raja Ayo Damak

2. Anggota

Puji Rahmad Harahap

3. Anggota

Salman Ador

4. Anggota

Fasmah Yans Sinaga

5. Anggota

Rahmadhiani Sari Itri Damak



Tanda Tangan








BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 1

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

: SIMALUNGUN
: SUMATERA UTARA
: SIMALUNGUN 1

Pada hari ini Selasa tanggal Uma bulan Maret tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(KPU Kabupaten/Kota) Simalungun telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU
Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di:
Kantor KPU Kabupaten Simalungun

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Partai Politik, serta diawasi oleh Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota berdasarkan formulir Model
D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota Simalungun dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ada/tidak ada kejadian khusus
dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat kabupaten/kota.

Demiikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 21... diapakah satu rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi Partai Politik
yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1. Ketua KPU Kabupaten/Kota <u>Johanna Naphtali Pradano</u>	2. Anggota KPU Kabupaten/Kota <u>Eka Sri Nova Haribuan</u>	3. Anggota KPU Kabupaten/Kota <u>Martuo Harahol R Holapea</u>	4. Anggota KPU Kabupaten/Kota <u>Farsai Hamzah</u>	5. Anggota KPU Kabupaten/Kota <u>Nico Olyvin Artlorong</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK				
1. Partai Kebangkitan Bangsa <u>Harahap</u>	2. Partai Gerakan Indonesia Raya <u>Resudin Nuse</u>	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan <u>G. H. H. H. H.</u>	4. Partai Amanat Nasional <u>Harahap</u>	5. Partai NasDem
6. Partai Buruh <u>Harahap</u>	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia <u>Harahap</u>	8. Partai Keadilan Sejahtera <u>Harahap</u>	9. Partai Kebangkitan Nusantara <u>Harahap</u>	10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia <u>Harahap</u>	12. Partai Amanat Nasional <u>Harahap</u>	13. Partai Bulan Bintang <u>Harahap</u>	14. Partai Demokrat <u>Harahap</u>	15. Partai Solidaritas Indonesia
16. PARTAI BERUNDO <u>Harahap</u>	17. Partai Persatuan Pembangunan <u>Harahap</u>	18. Partai Ummat <u>Harahap</u>		



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RAYA KAHEAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHEAN	RAYA	PAMATANG SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH										
		LK	7.091	10.104	2.474	6.379	6.590	6.956	12.090	4.921	61.259
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PR	7.320	10.118	2.548	6.650	6.854	7.193	12.141	5.023	62.549
		JML	14.411	20.222	5.022	13.029	13.444	14.149	24.231	9.944	123.808
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	5.180	7.537	1.634	4.437	4.909	4.920	8.162	3.497	43.841
		PR	5.487	7.416	1.621	4.456	5.022	5.139	8.767	3.444	44.982
		JML	10.667	14.953	3.255	8.893	9.931	10.059	16.929	6.941	88.823
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	1	3	11	4	32	4	11	5	72
		PR	1	2	10	7	47	1	16	5	89
		JML	2	5	21	11	79	5	27	10	161
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	75	125	21	87	60	80	173	78	823
		PR	122	160	48	114	79	112	246	102	1.175
		JML	197	285	69	201	139	192	419	180	1.998
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (A.1+B.2+B.3)	LK	5.256	7.665	1.666	4.528	5.001	5.004	8.346	3.580	44.736
		PR	5.610	7.578	1.679	4.577	5.148	5.252	9.029	3.551	46.246
		JML	10.866	15.243	3.345	9.105	10.149	10.256	17.375	7.131	90.982

NO.	URAIAN	RINCIAN									
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RAYA KAHEAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHEAN	RAYA	PAMATANG SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT		14.516	20.676	5.128	13.290	13.730	14.424	24.763	10.166	9.600
2	Jumlah surat suara yang digunakan		10.866	15.243	3.345	9.105	10.149	10.256	17.375	7.131	7.512
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		29	16	7	5	14	34	22	6	14
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpekel, termasuk sisa surat suara cadangan		3.621	5.417	1.776	4.180	3.567	4.134	7.366	3.029	2.074

NO.	URAIAN	RINCIAN									
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	RAYA KAHEAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHEAN	RAYA	PAMATANG SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		LK	10	12	1	0	11	12	20	5	10
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	16	8	0	1	9	15	25	5	10
		JML	26	20	1	1	20	27	45	10	20



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHAN	RAYA	PAMATANG SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	68	44	8	27	24	18	31	38	15	273
A.2	1. RAJAMAN AUGUSTINUS PURBA	25	13	3	13	10	7	12	8	4	95
	2. JUANDI TURNIP	2	7	0	1	1	0	6	2	1	20
	3. DESRY MELINDA SILALAH	2	1	2	2	2	1	2	1	0	13
	4. MELDA APRILDA PURBA	2	5	2	4	1	2	2	5	3	26
	5. SUMANTO SIPAYUNG	4	2	1	5	1	2	3	6	2	26
	6. EDU BRIANTO SIMBOLON	0	1	0	3	0	0	2	1	1	8
	7. RINI TIARA GINTING	2	0	0	3	2	0	0	4	1	12
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	105	73	16	58	41	30	58	65	27	473
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	155	103	13	74	56	45	138	75	36	695
A.2	1. ERWID PARULJAN SARAGIH, S.T.	1.655	86	4	31	14	332	1.546	132	225	4.225
	2. Ir. JAN POSMAN H PURBA	23	26	3	17	14	6	51	21	16	177
	3. CHRISTINE LAWATY S, S.Si	10	13	0	5	3	8	3	9	0	51
	4. WIRCHOT NALIM DAMANIK	15	9	99	7	4	6	8	7	3	158
	5. ERIKSON GIRSANG	7	16	0	12	7	0	5	10	5	62
	6. PUJA LESTARI SITOPU, S.Sos.	2	4	0	1	3	0	6	1	2	19
	7. JANSEN M SINAGA	8	26	2	15	5	2	29	10	13	110
	8. CHRISDON ZAKARIA PURBA, S.H.	2	7	7	6	6	0	20	3	1	52
	9. APRIA MALA PASKARI PURBA	1	1	0	1	2	1	0	0	1	7
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.878	291	128	169	114	600	1.806	268	302	5.556



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHKAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHKAN	RAYA	PAMATANG SILIMA HUTA	DOLOK MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78	381	43	217	108	22	139	150	111	1.249
A.2	1. S. SAMRIN GIBSANG, S.Pd.	425	3.150	382	729	67	13	1.038	278	1.864	7.946
	2. JUNTA VERONIKA BR MUNTHE, S.H., M.Kn.	133	1.348	307	1.759	1.300	31	75	1.270	126	6.349
	3. FRANS HAHOTAN SARAGIH	8	19	6	10	15	6	37	12	7	120
	4. TORA BULAN SARAGIH	9	16	3	11	9	4	8	7	5	72
	5. JUN FRANCO PURBA, S.T.	4	11	3	11	7	8	21	11	8	84
	6. SANG SURYANI SARAGIH, S.Kep.	1	7	0	5	16	15	66	1	2	113
	7. SARIANI BUARINTA LUBIS, S.E.	2	3	0	2	8	2	6	4	3	30
	8. JUNITA PITRIA ELVI MURNY SITOPU	1	17	7	25	55	4	3	30	0	142
	9. HERMANTO HAMONANGAN SIPATUNG, S.H.	150	7	3	9	15	149	10	5	14	362
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	811	4.959	754	2.778	1.600	254	1.403	1.768	2.140	16.467
A.1	4. Partai Golongan Karya	223	259	61	101	119	135	288	85	85	1.356
A.2	1. Drs. M Chriemes Haloho	1.543	2.271	359	239	705	1.304	918	572	425	8.336
	2. Jon Redikahmen Sidauruk	197	437	134	125	43	62	1.353	48	1.961	4.360
	3. Soryria Tarigan	5	11	0	7	9	5	18	14	3	72
	4. Tomy Pendrik Saragih, S.E.	550	172	187	66	225	628	4.999	49	505	7.381
	5. Johialam Saragih, S.H.	70	17	1	6	14	114	35	5	3	265
	6. Sinta Meirina H Nailoho, S.Pd.	3	5	1	4	4	7	4	3	0	31
	7. Julham Apendi Saragih, S.H.	870	300	51	16	101	3.335	471	3	71	5.218
	8. Hansdungan Livinus Siallagan	0	3	0	0	0	0	0	2	2	7
	9. Ika Sri Wulandari Sitepu, S.E.	1	0	0	4	1	0	3	2	0	11
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.462	3.475	794	568	1.221	5.590	8.089	783	3.055	27.037



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.3 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHRIAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHRIAN	RAYA	PAMATANG SELIMA HUTA	DOLOK MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	5. Partai NasDem	113	120	14	92	58	20	121	34	40	612
A.2	1. JAMERSON SARAGIH, S.P.	1.640	93	7	90	54	92	300	61	557	3.094
	2. KARVAN SARAGIH	16	22	5	6	5	44	5	2	11	116
	3. SEYENNI OKTARINI	1	8	1	9	5	2	9	3	1	39
	4. Drs. ROBENSUS SEMBERING	2	1.603	417	1.364	1.145	98	10	1.216	41	5.896
	5. AWENG SIMANJORANG	16	1.070	269	195	47	40	78	760	427	2.903
	6. ROSELINA	0	5	1	1	0	2	6	1	0	16
	7. TANJARGAM PURBA TAMBAK	0	3	1	1	2	2	10	1	0	20
	8. MEY PRIADIN PURBA, S.H.	90	9	22	8	0	1	2.338	0	120	2.588
	9. MAWAR SUJABAT	1	1	0	2	0	0	4	0	0	8
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.079	2.934	737	1.769	1.316	301	2.881	2.078	1.197	15.292
A.1	6. Partai Buruh	2	4	0	6	2	2	17	8	1	42
A.2	1. TUTI RAMIATI	0	5	2	5	2	1	2	1	0	18
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2	9	2	11	4	3	19	9	1	60



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.4 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHEAN	PURBA	HARANGGACIL HORISAN	SILAMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHEAN	RAYA	PAMATANO SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	7. Partai Gerakan Rakyat Indonesia	20	21	8	9	8	26	17	10	8	127
A.2											0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	20	21	8	9	8	26	17	10	8	127
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	6	6	5	11	4	8	31	7	1	79
A.2	1. Drs. JAMALUDDIN SIRIBGAR	60	2	0	4	3	18	16	1	0	104
	2. INTAN RAHMADANTI, S.P.	2	0	0	18	5	0	10	0	1	36
	3. RAHMAT SINGERLIASTA KARO-KARO	1	12	0	34	2	0	14	1	2	66
	4. HUSAMUDDIN ALPAKHRY SARAGIH	3	2	0	2	3	1	4	0	0	15
	5. Mhd. Nasrun Simamora	0	2	0	0	0	3	5	1	0	11
	6. Mesriati, S.Pd.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
	7. Ari Aliansyah	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	74	24	5	69	17	30	83	10	4	316



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.5 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHAN	PURBA	HARANGGAOL HOKUSAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHAN	RAYA	PAMATANG SILIMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	6	0	0	0	3	0	0	1	0	10
A.2	.										0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	6	0	0	0	3	0	0	1	0	10
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	25	13	8	31	17	4	7	36	2	143
A.2	1. JARUSDIN SINAGA	74	255	236	491	86	2	30	710	125	2.009
	2. HAMONANGAN	2	4	0	2	5	0	107	9	4	133
	3. RESTI NAWATI PURBA	10	1	0	1	1	0	2	1	0	16
	4. RONAL HARIYADI SINAGA	1.012	30	3	43	2	34	80	20	18	1.242
	5. ALEXIUS PURBA	2	17	2	6	3	0	0	0	0	30
	6. NURMINAH TM. SIAHAAN	0	1	0	1	2	0	1	0	0	5
	7. HERDIN ZULKIFLI SARAGIH	7	0	0	4	2	0	1	1	1	16
	8. MARLIANTON PURBA	0	0	0	2	23	3	1	0	0	29
	9. MELANI APRILIANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.132	321	249	581	141	43	229	777	150	3.623



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.6 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHEAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHEAN	RAYA	PAMATANO SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	5	0	3	3	0	5	2	0	18
A.2	.										0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	0	5	0	3	3	0	5	2	0	18
A.1	12. Partai Amanat Nasional	1	3	1	5	3	0	1	4	1	19
A.2	.										0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	3	1	5	3	0	1	4	1	19



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.7 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHAN	PURBA	HARANGGAOL, HORISAN	SILIMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHAN	RAYA	PAMATANG SILIMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	13. Partai Bulan Bintang	0	1	0	0	1	1	2	3	1	9
A.2	.										0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	0	1	0	0	1	1	2	3	1	9
A.1	14. Partai Demokrat	15	66	13	90	87	4	20	41	6	342
A.2	1. HOTMAN PARULIAN SIPAYUNG, S.E.	16	1.271	387	1.758	737	47	254	597	146	5.213
	2. UMUM TARIGAN	175	323	0	226	2.657	0	22	102	5	3.510
	3. DIRA PERMATA SARI DAMANIK, S.H.	0	5	1	3	6	1	2	0	2	20
	4. JUL PIKAR PURBA, S.Th.	1	4	2	8	9	82	7	5	2	120
	5. HARRI OKTO PURBA	1	2	1	2	4	2	6	7	0	25
	6. RUSDIANA HUTASOTT	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
	7. SRI SURYA NINGSIH	2	1	1	0	0	0	1	0	0	5
	8. BENRI YUDISTIRA SIDABUTAR	1	5	0	0	0	0	155	0	0	161
	9. BALKER HALOHO	1	218	0	4	3	0	1	1	3	231
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	212	1.896	405	2.091	3.504	136	469	754	164	9.631



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN I

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.8 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHBAN	PURBA	HARANGGAOL HORISAN	SILMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHBAN	RAYA	PAMATANG SILMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	7	20	4	18	4	21	9	12	2	97
A.2	1. JONLI ALZODEN SITOPU	44	25	1	7	13	885	13	7	7	1.002
	2. BRIANI SARAGIH	2	2	1	2	2	1	4	3	3	20
	3. HOTMADIAMAN DAMANIK	3	16	9	26	29	9	2	12	3	109
	4. JAHATIN SILALAH	3	12	1	10	8	2	7	4	8	55
	5. RADISNA SILALAH	0	0	0	4	0	1	2	1	1	9
	6. JV DANIEL S MUNTHE	0	2	0	1	1	0	3	0	0	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	59	77	16	68	57	919	40	39	24	1.299
A.1	16. PARTAI PERINDO	9	33	1	17	45	39	26	10	12	192
A.2	1. Saide Purba	127	90	2	11	210	1.855	222	3	95	2.615
	2. Armenstus Sijabat	2	12	1	14	4	1	1	89	5	129
	3. Sendi Wartio Purba	1	3	0	1	3	1	1	2	0	12
	4. EFFHARIS JUSTER SINAGA, S.E.	2	429	114	449	1.524	152	62	187	56	2.975
	5. Sera Yohana Saragih	0	2	0	1	11	2	7	1	1	25
	6. Johnny Aerial Sinaga, S.T.	11	53	3	66	11	6	1.308	16	118	1.592
	7. Sukaria Jaluksu	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	8. Rikanson Jutamardi Purba, S.E.	8	14	29	7	1	0	312	0	17	388
	9. Jetro Saragih	454	4	1	3	1	1	1	0	1	466
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	614	640	151	569	1.810	2.058	1.941	308	305	8.396



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MODEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 2.9 Lember 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHAN	PURBA	HARANOGAI, HORISAN	SILAMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHAN	RAYA	PAMATANG SILIMA HUTA	DOLOG MASAGAL	JUMLAH AKHIR
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON											
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	3	4	0	3	0	2	2	1	1	16
A.2	1. ROHMANSIH PURBA, A.Ma.	5	4	1	1	1	10	1	1	0	24
	2. SITTI NURHADIYAH	1	2	0	1	1	2	1	0	0	8
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	9	10	1	5	2	14	4	2	1	48
A.1	24. Partai Ummat	3	4	0	4	1	0	2	0	2	16
A.2	.										0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3	4	0	4	1	0	2	0	2	16



KABUPATEN/KOTA : SIMALUNGUN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SIMALUNGUN 1

MUDEL
D. HASIL KABKO-DPRD
KABKO
HALAMAN 2 - 3 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		RAYA KAHEAN	PURBA	HARANOGAOL HORISAN	SILIMAKUTA	DOLOK SILOU	SILOU KAHEAN	RAYA	PAMATANG SILIMA HUTA	DOLOK MASAGAL	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	10.467	14.743	3.267	8.757	9.846	10.005	17.049	6.881	7.382	88.397
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	399	500	78	348	303	251	326	250	130	2.585
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	10.866	15.243	3.345	9.105	10.149	10.256	17.375	7.131	7.512	90.982

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1. Johan Zephan Hadjira	2. Eka Sri Nadi Harbuan	3. Martua Harasac R Hutapea	4. Faizal Hamzah	5. Wiko Orywin Anifonang
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK				
1. Partai Kebangkitan Bangsa	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4. Partai Golongan Karya	5. Partai NasDem
6. Partai Buruh	7. Partai Delombong Rakyat Indonesia	8. Partai Keadilan Sejahtera	9. Partai Kebangkitan Nusantara	10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia	12. Partai Amanat Nasional	13. Partai Bulan Bintang	14. Partai Demokrat	15. Partai Solidaritas Indonesia
16. PARTAI PERKOTA	17. Partai Persatuan Pembangunan	18. Partai Ummat		



001436-1A

NO.	URAIAN	RENCIAN																			
		RATA KAREAS	PURBA	SARAGAGA OL HOBSON	SILIMAKIT A	DOLOS SILAU	SILOU KAHANAN	RATA	PAMATARU SILINA BUTA	DOLOS MABAGAL	JUMLAN AKHIR										
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII					
A.	DATA PENILIH																				
1. Jumlah Pemilih dalam DPT Model A.3-471)	LK	6.675	8.127	1.964	5.730	5.618	6.040	9.962	4.421	4.303						52.84					
	PR	6.662	8.250	1.920	5.900	5.924	6.146	10.175	4.506	4.128						53.23					
	JML	13.337	16.377	3.884	11.630	11.142	12.186	20.137	8.927	8.431						106.06					
2. Jumlah Pemilih dalam DPT Model A.4-473)	LK	3	3	2	3	3	8	39	2	2						345					
	PR	6	1	2	1	7	8	3	2	2						60					
	JML	9	4	4	4	10	16	70	4	4						405					
3. Jumlah Pemilih dalam DPK Model A.DPK-474)	LK	82	249	42	288	68	150	243	37	132						1.31					
	PR	106	298	67	418	118	236	501	89	176						2.00					
	JML	188	547	109	706	186	386	744	146	308						3.32					
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	6.760	8.379	2.008	6.021	5.689	6.198	10.022	4.440	4.437						5.946					
	PR	6.774	8.549	1.999	6.319	5.649	6.390	10.175	4.507	4.306						5.940					
	JML	13.534	16.928	4.007	12.340	11.338	12.588	20.237	8.947	8.743						11.886					
B.	PENGOUGA RAK PILIH																				
1. Jumlah pengoga hak pilih dalam DPT Model C7 DPT-475)	LK	5.196	6.486	1.564	3.843	4.442	4.725	7.825	3.177	3.427						40.68					
	PR	5.364	6.664	1.529	3.683	4.514	4.926	7.912	3.099	3.441						41.13					
	JML	10.560	13.150	3.093	7.526	8.956	9.651	15.737	6.276	6.868						81.81					
2. Jumlah pengoga hak pilih dalam DPK Model C7 DPK-476)	LK	1	0	0	0	1	1	7	0	0						10					
	PR	4	0	0	0	1	2	9	0	0						14					
	JML	5	0	0	0	2	3	16	0	0						24					
3. Jumlah pengoga hak pilih dalam DPK Model C7 DPK-477)	LK	82	249	42	288	68	150	243	37	132						1.31					
	PR	106	298	67	418	118	236	501	89	176						2.00					
	JML	188	547	109	706	186	386	744	146	308						3.32					
4. Jumlah Pengoga Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.279	6.735		4.131		4.876	8.075	3.224	3.559						43.00					
	PR	5.474	6.962		4.131		5.164	8.422	3.188	3.617						43.05					
	JML	10.753	13.697		8.262		10.040	16.497	6.422	7.176						86.05					

1. KETUA		2. WAKIL		3. WAKIL		4. WAKIL		5. WAKIL	
									
NAMA KETUA		NAMA WAKIL		NAMA WAKIL		NAMA WAKIL		NAMA WAKIL	
RIZKI		EDDY RUMAH		Chandra		Rahmat		Rahmat	

[illegible]

Lecture 3 (Feb 2 - 3)



NO.		URAIAN		RINCIAN												JUMMLAH AKHIR					
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	RAYA KAHAYAN	PUSRA	BARAGGA OL HOSORON	SILIMAKUT A	DOLOK SILAU	SILOK KAHAYAN	RAYA	PAMATAN SILIMA HUTA	DOLOK MARAGAL											
											01	02	03	04	05		06	07	08	09	10
BOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																					
A.1	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan																				
A.2	1 MAHA MUHAMMAD BANGKONG ST	73	178	55	219	139	62	280	116	69						1.163					
	2 IB SAMON GUSMAN, S.Pd	33	134	47	46	164	103	2.625	41	421						3.614					
	3 JUNTA VERONICA MUNTUK, S.Pd	40	2.308	211	719	35	21	607	237	340						4.524					
	4 SASIREH GUSMAN, SH, MH	37	668	199	1.428	535	295	460	798	215						4.636					
	5 YOGISMAN SIPAYONG	28	87	34	188	62	9	15	39	10						472					
	6 BANNY HORNELUGA GUSMAN	21	872	436	1.509	321	199	262	347	377						4.944					
	7 BINTA MAI BINA D NABURIO	4	6	2	24	10	7	6	7	3						69					
	8 MARCON PUSRA	3	6	1	7	2	30	4	4	3						60					
	9 VICTOR PERAKUN AKUN	1.315	192	35	35	25	209	424	64	198						2.497					
		1	16	11	53	889	0	2	74	1						1.047					
B.	JUMMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	1.555	4.467	1.031	4.221	2.182	935	4.635	1.757	1.643						22.436					
A.1	4 Partai Gerakan Karya																				
A.2	1 JUMMLAH SARAGU, SH	142	63	16	30	37	47	70	51	51						507					
	2 MAKEN GUSMAN, S.Pd	1.374	34	7	13	46	126	319	14	56						1.960					
	3 BORRIGA YARGAN	5	68	5	70	6	13	48	474	5						742					
	4 NURSAGAH PUSRA	4	20	17	26	153	5	48	11	5						291					
	5 LUK BILUKALAN SILIMAKUT	112	12	3	11	13	39	209	9	10						412					
	6 ELA TRANTO SIPAYONG, S.Pd	8	240	140	1	20	201	7	1.465	20	2.187					4.165					
	7 SARAHAN PUSRA	23	6.304	5	2	15	838	34	14	9						978					
	8 PROTIVIN GUSMAN, S.Pd	0	3.238	3	2	8	0	17	27	27						365					
	9 PITULUS CASIKO SARAGU, A. MH	2	8	2	10	1	2	3	1	2						31					
		11	984	227	190	29	0	176	84	264						1.561					
B.	JUMMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	1.681	1.711			335	1.103	2.392	699	2.666						11.937					

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SUMEDANG					NAMA DAN TANDA TANGAN PASCA PARLI POLITIK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



NO.		URAIAN		KENDARAAN																			
IV.		DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		RATA KAHKAN	PURBA	BARANGKA OL BORDON	SILIMAKUT A	DOLOK SELAU	SELOU KAHKAN	RAYA	PANATANG SILIMA HUTA	DOLOK MARAGAL											JUNJIAN AKHIR
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17							
		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14						
A.1		5 Partai Radikal		98	56	14	31	29	67	118	30	32											
A.2		1 JETRU SARAGIH		980	32	6	14	12	121	27	12	10											475
		2 JAMESON SARAGIH, S.P		1.703	222	26	177	33	342	655	140	632											1.894
		3 MUPINA ARJUN, S.Pw, M.Ps		6	4	5	12	6	13	11	12	5											3.920
		4 DR. JOHN SASEDOK PURBA		25	927	161	122	28	68	786	52	169											74
		5 MEY PRADIN PURBA, SH		7	110	7	6	9	14	1.828	10	77											2.338
		6 ROOMBIS SARAGIH		2	8	2	1	2	18	12	1	2											2.068
		7 KAPVAN SARAGIH		93	122	65	4	88	2.940	47	28	1											48
		8 JAYA DAMANIK, S.Si, MM, MM		1	313	222	105	363	2	27	72	12											3.368
		9 HESIONA HUTAJALAN		2	0	0	0	13	1	0	2	0											1.117
																		18					
B.		JUMELAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2.887	1.794	508	472	583	3.586	3.531	359	940											14.640
A.1		6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia																14.640					
A.2				4	20	2	9	4	14	6	4	0											63
</																							

[illegible]



NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN AGUNG RAGAJI										NAMA DAN TANDA TANGAN PARTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SUMALANG										NAMA DAN TANDA TANGAN KOMITEE HASTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



KABUPATEN/KOTA *)

: SIMALUNGUN

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

DAERAH PEMILIHAN

: SIMALUNGUN 1

MODEL
DB1-DPRD
KAB/KOTA

Lampiran 3 Bab 6 - 1



NO.	URAIAN	RENCIAN																JUMLAH AKHIR
		RATA KABUPATEN	PURBA	SARANAGA OL BORGESON	SILIMANTY A	DOLOH SILAU	SILOU KABUPATEN	RATA	PAMATANG SILIMA BUTA	DOLOH MABAGAL								
IV.	DATA PENGULASAN RIJARA PARTAI POLITIK DAN RIJARA CALON	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI		
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI		
A.1	11 Partai Solidaritas Indonesia	68	21	12	21	18	16	44	12	12								
A.2	1 JAWAY RIJAL SARIGUL, SS	1.052	196	264	175	169	242	595	13	199						224		
	2 BENED PUSHA	107	5	0	20	2	12	39	2	5						2.902		
	3 MARTINA NATALLA RIJASUPAR	0	1	1	1	3	1	4	1	3						182		
	4 ROSEN RIJUMANTO SARAGUL	5	1	0	5	4	1	23	1	6						15		
	5 CHRIST DAMAYANTI DAMANIK	0	1	0	1	0	2	2	3	0						46		
	6 LENDAKO MANDUT SIPKOTUNG	0	6	2	1	3	1	1	2	0						9		
																16		



KABUPATEN/KOTA *

: SIMALUNGUN

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

DAERAH PEMILIHAN

: SIMALUNGUN 1

MODEL
DB1-DPRD
KAB/KOTA

Lembar 3 Bal 1 - 1



DB1-47-08

NO.	URAIAN	KINCAN														Jumlah Akhir
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	RATA KAHKAN	PURBA	SARANAGA OL BORDSON	SILIMANUT A	DOLOK SILAT	SILUO KAHKAN	RATA	PAMATANG SILIMA RUTA	DOLOK KABAGAL						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
B. NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																
A.1	13 Partai Hati Nenas Rakyat	39	11	8	30	6	14	3	60	3						
A.2	1 JAKESDIN SINGA	16	106	194	392	59	1	10	1.135	1						174
	2 ERNESTA SARAGIH	2	21	3	210	69	3	8	8	0						1.917
	3 RICHARD SINGA	6	11	0	4	4	5	3	3	0						324
	4 ZAINAL ARIFIN DAMANIK	1.132	10	0	1	0	232	54	2	0						35
	5 ALFREDO FRANCIS SARAGIH, S.Pd	0	21	3	1	0	0	1	8	3						1.431
	6 RICHMILIA PURBA	4	439	19	56	64	3	62	8	02						34
	7 RIZY SUGARA PURBA	0	0	0	2	1	2	2	1	0						717
	8 ANITA SUSWANTI WAJULU	0	2	0	2	0	0	0	1							8
																7
B.	Jumlah Suara Sari Partai Politik Dan Calon (A.1+A.2)	1.199	621	227	701	203	260	143	1.222	70						4.648
A.1	14 Partai Demokrat	20	73	8	51	216	46	61	118	20						
A.2	1 ELIAS SARUH	18	839	25	886	4.166	143	664	1.099	304						613
	2 Ima JOURNAL PURBA	42	162	1	8	35	426	128	8	12						8.144
	3 RRY DINI YANIGAN	2	8	0	2	7	7	4	5	4						822
	4 HALLER BALIRO	2	1.175	35	32	29	39	85	07	397						39
	5 HESLON SARAGIH, Dy	2	26	7	11	3	4	250	5	28						1.839
	6 USHUT ROPUTANIN SARAGIH	2	2	0	1	2	2	8	4	2						337
	7 MOSERY HARSANTO SITOMERIS	3	0	0	0	1	1	2	0	0						23
	8 LISA VARIUS SARAGIH	3	11	3	1	2	1	0	2	6						7
																27
B.	Jumlah Suara Sari Partai Politik Dan Calon (A.1+A.2)	94	229	50	892	4.454	668	1.202	1.299	773						11.871

KAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

KAMA DAN TANDA TANGAN SAR PARTAI POLITIK



NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BIMA										NAMA DAN TANDA TANGAN PARTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



KABUPATEN/KOTA :

SIMALUNGUN

PROVINSI :

SUMATERA UTARA

DAERAH PEMILIHAN :

SIMALUNGUN 1

MODEL
D81-DPRD
KAB/KOTA

Lembar 1 dari 1



01-0044

NO.	URAIAN	RINCIAN															
V.	DATA SUARA BAH DAN TIDAK BAH	RAYA KARANGAN	PURBA	SARANGGA OL BORISON	SILIMAKUT A	DOLOK SILAU	SILOU KARANGAN	RAYA	PAMATANG SILINA HUTA	DOLOK MARAGAL							JUMLAH AKHIR
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)	(XVI)	(XVII)	(XVIII)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (V.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)	10.427	13.384	3.147	7.968	8.888	9.695	16.124	6.172	7.055							82.860
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	320	313	55	264	256	345	373	250	121							2.303
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)	10.753	13.697	3.202	8.232	9.144	10.040	16.497	6.422	7.176							85.163

Ditetapkan di: PAMATANG RAYA

Tanggal: 0 5

Bulan: 0 5

Tahun: 2 0 1 9

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN							
1. PETRA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA			
NAMA DAN TANDA TANGAN BAGI PARTAI POLITIK							
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERAKAN RAKYAT	3. PARTAI PERKEMBARANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI MUDA MUDA	6. PARTAI GARUDA	7. PARTAI BERKARYA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9. PARTAI PESINDO	10. PARTAI PERHATIAN PERKAWANAN	11. PARTAI BOLA KAWAN INDONESIA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	13. PARTAI HARUKA	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI BELAS BINTANG	16. PARTAI KEMAJUAN DAN PERHATIAN INDONESIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 060/HM.03.4-SD/1208/2/2025 Pamatang Raya, 24 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth. :

Bapak Koordinator Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Koordinator Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi Nomor : 80/UN21.4.3.2/HK.05/2025 tanggal 25 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah memberi izin penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk mengumpulkan data dalam rangka bahan penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Adapun waktu penelitian mulai tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 24 Februari 2025 dan memberi data-data dukung dan informasi yang diperlukan bahan penulisan skripsi atas :

Nama : Nafa Pratiwi Purba
NIM : B1B221026
Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jambi
Judul skripsi : Baliho sebagai Alat Peraga Kampanye dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk diketahui semoga kerja sama ini bermanfaat dan berkesinambungan selanjutnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun,



Johan Septian Pradana

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Kab Simalungun sebagai Laporan;
3. Peringgal.

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Nafa Pratiwi Purba

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Purba Dolok, 03 Agustus 2003

Agama : Kristen Protestan

Status : Belum Kawin

Alamat : Kampung Kristen 1, Nagori Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun

No. Telepon : 081375208990

E-mail : nafajambi8@gmail.com

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kota/Kabupaten	Tahun
SD	SD NEGERI 091354 PURBA DOLOK	Simalungun	2009 - 2015
SMP	SMP NEGERI 1 PURBA	Simalungun	2015 - 2018
SMA	SMA SWASTA GKPS 1 PAMATANG RAYA	Simalungun	2018 - 2021